

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *LEVERAGE*
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERBANKAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2004 - 2007**



TESIS

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna
Memperoleh derajat sarjana S-2 Magister Manajemen
Universitas Diponegoro**

Oleh :

**Sam'ani
NIM C4A006220**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**



Sertifikat

Saya, *Sam'ani*, yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri yang belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada Program Magister Manajemen ini ataupun pada program lainnya. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawabannya sepenuhnya berada di pundak saya.

Sam'ani, S.E.

19 September 2008

PENGESAHAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis berjudul:
PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *LEVERAGE*
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERBANKAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2004 – 2007

yang disusun oleh Sam'ani, NIM C4A006220
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 September 2008
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Drs. M. Kholiq Mahfud, MSi.

Drs. Basuki Hadiprajitno, Akt, MBA, MSAcc.

Semarang, 19 September 2008
Universitas Diponegoro
Program Pascasarjana
Program Studi Magister Manajemen
Ketua Program

Prof. Dr. Augusty Tae Ferdinand, MBA.

ABSTRACT

Corporate governance's perspective has begun from agency theory that principal as entity's owner give an authority to agent. The separate authority between ownership and management would make any different of interest both of them that may take potential conflict. Corporate governance's perspective will control the behavior and fixed the conflict among company stakeholder. The research about corporate governance's perspective toward the performance has commonly focused, but any findings show inconsistency results. Further reconciliation of this result, it's interesting to make research with different object.

This research has purpose to find any empirical evidence about influence of many element of corporate governance's implementation toward to performance of banking in Indonesia. The population is listed banking at Bursa Efek Indonesia (BEI) that chooses for 2004 -2007 as the sample. Purposive sampling method has used to take these sample data. Hypothesis testing used regression analysis.

Results show that influence of corporate governance that proximate by institutional ownership and leverage ratio has negatively and significant influence, otherwise commissioner activities, size board of director, and audit committee have positively influence. And existence of independent commissioner has no significantly influence. Generally this results indicating that Indonesian's banking has begin to implementing corporate governance's perspective toward increasing company performance and protect principal interest.

Keywords: Corporate governance's perspective, institutional ownership, commissioner activities, size board of director, and audit committee, existence of independent commissioner, Leverage, CFROA.

ABSTRAKSI

Perkembangan perspektif *corporate governance* berawal dari *agency theory*, dimana dalam *agency theory*, prinsipal yang bertindak sebagai pemilik perusahaan menyerahkan kewenangannya kepada agen. Dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan maka akan memunculkan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal yang dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan. *Corporate governance* muncul untuk mengendalikan perilaku dan mengatasi konflik antara pihak-pihak dalam perusahaan. Penelitian tentang *corporate governance* terhadap kinerja, telah menjadi fokus umum namun hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Untuk merekonsiliasi perbedaan hasil penelitian tersebut, dilakukan penelitian serupa dengan objek yang berbeda.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh elemen-elemen dalam penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan perbankan di Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan sampel adalah perusahaan perbankan selama periode 2004-2007. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda.

Dari hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa pengaruh *corporate governance* yang diproksi oleh aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan rasio leverage mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kinerja. Akan tetapi variabel komisaris independen secara signifikan tidak dapat mempengaruhi kinerja. Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan perbankan di Indonesia sudah mulai menerapkan *good corporate governance* dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan serta untuk melindungi kepentingan para *principal*.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance, Kepemilikan Institusional, Aktivitas Komisaris, Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite audit. Leverage dan CFROA.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan doa kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga penulisan tesis dengan judul “PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *LEVERAGE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2004 – 2007” dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Manajemen (S-2) di Universitas Diponegoro.

Banyak pihak yang memberikan bantuan moril dan materil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Drs. M. Kholiq Mahfud, MSi., selaku dosen pembimbing utama yang banyak memberikan saran dan petunjuk dalam penyusunan tesis ini.
2. Drs. Basuki Hadiprajitno, Akt, MBA, MSAcc., selaku dosen pembimbing pembimbing yang banyak memberikan saran dan petunjuk dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak, Ibu, dan Istriku serta ketiga anakku Salma, Fikri dan Daffa tercinta yang dengan penuh kesabaran memberikan dukungan, motivasi serta doa tulusnya dengan segenap rasa cinta.
4. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis.
5. Mas Fathurrohman atas ide-ide cerdas, segala bantuan dan saran-sarannya dan “terimakasih telah memberi makna hidup dengan nuansa yang berbeda”..
6. Pak Wardi, Pak Winarto, Pak Makmun, Mas Pandu, Bu Hadiahti Utami, Astri Berliani, Helmi, Agustina, Diana, Dini, Mirwan, Yunies, Niken, Lisa, Mbak

Dian, Anindityo, Agung, Hasbi serta seluruh Rekan-rekan di angkatan 27 kelas pagi, rekan diskusi dan semangat yang diberikan

7. Pak Sartono, Pak Harnomo, Pak Saniman, Pak Ardiansyah, Pak Nyata atas koreksi dan evaluasinya.
8. Bapak-bapak dan ibu-ibu rekan kerja di POLINES yang telah memberikan dorongan serta bantuannya.
9. Tak lupa terima kasih penulis ucapkan bagi semua pihak yang tidak dapat penulis ungkapkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu dengan rendah hati dan lapang dada penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kelanjutan pembuatan penelitian ini. Semoga tesis ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca akan mampu memberikan sumbangsih sekecil apapun untuk diterapkan baik dalam praktek maupun untuk penelitian selanjutnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat, Ridho dan HidayahNya atas segala amal baiknya.

Billahittaufiq Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang , September 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
SERTIFIKASI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	vi
ABSTRACT.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II. TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN MODEL.....	16
2.1. Pengertian dan Konsep Dasar Good Corporate Governance (GCG).....	16
2.2. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	20
2.2.1 Kepemilikan Institusional.....	24
2.2.2 Dewan Komisaris.....	25
2.2.3 Ukuran Dewan Direksi.....	29
2.2.4 Komisaris Independen.....	31
2.2.5 Komite Audit.....	34
2.2.6 Leverage Perusahaan.....	36
2.3. Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan.....	39
2.4. Penelitian Terdahulu.....	41

2.5.	Kerangka Pemikiran Teoritis	44
2.6.	Perumusan Hipotesis.....	45
BAB III.	METODE PENELITIAN	46
3.1.	Metode Pengumpulan Data	46
3.1.1.	Jenis dan Sumber Data	46
3.1.2.	Populasi dan Sampel	46
3.1.3.	Pengumpulan Data	47
3.1.4.	Difinisi Operasional Variabel dan Pengukurannya.....	48
3.2.	Metode Analisis	50
3.2.1.	Statistik Deskriptif.....	50
3.2.2.	Uji Asumsi Klasik	50
3.2.3.	Pengujian Hipotesis	51
3.2.3.1.	Uji t.....	52
3.2.3.2.	Uji F.....	53
3.2.3.3.	Uji R ²	54
BAB IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1.	Gambaran Umum dan Deskriptif Data Obyek Penelitian.....	56
4.1.1.	Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	56
4.1.2.	Deskriptif Statistik Variabel Penelitian.....	56
4.2.	Uji Kualitas Data.....	59
4.2.1.	Uji Normalitas	59
4.2.2.	Uji Asumsi Klasik	63
4.2.2.1.	Uji Multikolinearitas	63
4.2.2.2.	Uji Heteroskedastisitas.....	65
4.2.2.3.	Uji Autokorelasi	69
4.3.	Pengujian Hipotesis 1.....	70
4.3.1.	Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	70
4.3.2.	Hasil Uji Pengaruh Simultan (F test)	70
4.3.3.	Uji Signifikansi Parameter Individual (t test)	71

4.4. Pembahasan.....	77
BAB V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI HASIL PENELITIAN.....	93
5.1. Kesimpulan	93
5.2. Implikasi Hasil Penelitian	95
5.2.1. Implikasi Teoritis	95
5.2.2. Implikasi Manajerial.....	96
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	98
5.4. Agenda Penelitian Mendatang	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Ringkasan Penelitian Terdahulu	43
Tabel 4.1.	Deskripsi Variabel Penelitian Bank-Bank Sampel	56
Tabel 4.2.	Hasil Pengujian Normalitas dengan Uji Kolmogorov-Smirnov	61
Tabel 4.3.	Hasil Uji Multikolinearitas	62
Tabel 4.4.	Hasil Besaran Korelasi antar Variabel.....	63
Tabel 4.5.	Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Uji Glejser.....	65
Tabel 4.6.	Uji Durbin-Watson	67
Tabel 4.7.	Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R^2).....	69
Tabel 4.8.	Uji Simultan antara Variable Independent dengan Variable Dependen	70
Tabel 4.9.	Hasil Perhitungan Pengujian Parameter Individual.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis.....	44
Gambar 4.1. Grafik Histogram.....	45
Gambar 4.2. <i>Normal Probability Plot</i>	60
Gambar 4.3. Grafik Scatterplot	64
Gambar 4.4. Statistik d Durbin-Watson	66
Gambar 4.5. Hasil Uji Durbin-Watson.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Nama Sampel	111
Lampiran 2. Data Penelitian.....	112
Lampiran 3. Asumsi Klasik	114
Lampiran 4. Output Regresi.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good corporate governance* merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang *good corporate governance* (GCG) bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Tjager, 2003 dalam Darmawati 2004).

Kajian mengenai *corporate governance* meningkat dengan pesat seiring dengan terbukanya skandal keuangan berskala besar seperti skandal Enron, Tyco, Worldcom, Merck, Global Crossing mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett, Marcuss, Saunders dan Tehranian, 2006) yang melibatkan akuntan, salah satu elemen penting dari *good corporate governance*. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk (Boediono, 2005) juga melibatkan pelaporan keuangan (*financial reporting*) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Boediono, 2005).

Dengan melihat beberapa contoh kasus tersebut, sangat relevan bila ditarik suatu pertanyaan tentang efektivitas penerapan *corporate governance*. Bukti menunjukkan lemahnya praktik *corporate governance* di Indonesia mengarah pada defisiensi pembuatan keputusan dalam ¹ ahaan dan tindakan perusahaan (Alijoyo *et al.*, 2004). *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan.

Corporate governanace merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efesiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Darmawati, Khomsiyah dan Rika, 2004).

Good Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen dalam perusahaan (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam paradigma ini, Dewan Komisaris berada pada posisi untuk memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham - yaitu untuk

meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. Demikian juga Komite Audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance*, (*Improving Audit Committee Performance: What Works Best - A Research Report prepared by Pricewaterhouse Coopers, the Institute of Internal Auditors Research Foundation*).

Mengingat bahwa akhir-akhir ini *Corporate Governance* merupakan salah satu topik pembahasan sehubungan dengan semakin gencarnya publikasi tentang kecurangan (*fraud*) maupun keterpurukan bisnis yang terjadi sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh para eksekutif manajemen, maka hal ini menimbulkan suatu tanda tanya tentang kecukupan (*adequacy*) *Corporate Governance*. Demikian pula halnya tentang kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dipertanyakan. Oleh karena itu adalah suatu hal yang wajar dan penting bagi semua pihak yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan untuk mengupayakan mengurangi bahkan menghilangkan krisis kepercayaan (*credibility gap*) dengan mengkaji kembali peranan masing-masing dalam proses penyusunan tersebut.

Ada beberapa peraturan terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance* baik yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), maupun Keputusan Menteri BUMN. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum

serta Surat Edaran Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Bank berkewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap aktivitas usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) juga sudah mensyaratkan keberadaan komisaris independent dan komite audit bagi semua perusahaan publik. Ditambah lagi, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 117/2002 sudah mensyaratkan hal yang sama untuk BUMN. Rujukan-rujukan tentang praktik-praktik terbaik sudah tersedia luas. Misalnya, melalui FCGI untuk rujukan praktik terbaik penerapan manajemen risiko dan komite audit serta melalui *Indonesian Society of Independent Commissioners* (ISICOM) untuk praktik terbaik fungsi dan peran komisaris independen.

Pilot Project Self Assessment merupakan salah satu mekanisme yang diterapkan oleh Bank Indonesia untuk mengukur tingkat GCG perbankan di Indonesia. Proyek ini September 2007 dilakukan terhadap 130 bank termasuk kantor cabang bank asing. Penilaian dilakukan pada 13 aspek. Dari 130 bank yang ditelaah, 12 bank memperoleh kategori sangat baik, 76 bank baik, 39 bank cukup baik, dan 3 bank kurang baik. Lebih lanjut, hasil evaluasi BI menyebutkan, 53,5 persen bank di Indonesia belum memiliki Komisaris Independen, 30,7 persen bank belum membentuk komite secara lengkap, dan 18,8 persen bank belum memiliki jumlah komisaris yang lebih besar dari jumlah direksi. Dari penelitian Bank Indonesia tersebut menunjukkan bahwa GCG masih sebatas peraturan belum menjadi budaya

organisasi, 69,3 persen bank yang beroperasi di Indonesia belum mematuhi ketentuan *good corporate governance* (GCG) (Ghufron, 2008).

Sehubungan dengan itu dibutuhkan ketegasan pihak-pihak yang terkait. Contoh, baru-baru ini Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) memberikan sanksi kepada tiga perusahaan yang terdaftar di Bursa. Salah satu diantaranya terbukti melaksanakan transaksi pinjaman senilai Rp. 10 milyar kepada 64% pemegang sahamnya tanpa persetujuan dari pemegang saham lainnya. Hal ini dianggap melanggar ketentuan BAPEPAM mengenai benturan kepentingan. (Bisnis Indonesia, "Bapepam kenakan sanksi kepada 3 emiten dan 4 sekuritas". www.bisnis.com).

Institusi keuangan perbankan memiliki sifat usaha spesifik (*nature of the firm*) yang membedakannya dari institusi non-keuangan (Macey dan O'Hara, 2003 dalam Supriyatno 2006). Sifat usaha spesifik tersebut mendorong topik penelitian dalam industri perbankan dewasa ini mengarah pada masalah *corporate governance*, terlebih lagi setelah beberapa negara Asia terkena krisis finansial. (Arun dan Turner, 2003 dalam Supriyatno 2006). Banyak ahli yang berpendapat bahwa kelemahan didalam penerapan *corporate governance* merupakan salah satu sumber kerawanan ekonomi yang menyebabkan memburuknya perekonomian negara-negara tersebut pada tahun 1997 dan 1998. (Husnan, 2001). *Corporate governance* pada industri perbankan di negara berkembang seperti halnya Indonesia pada pasca krisis keuangan menjadi semakin penting mengingat beberapa hal. *Pertama*, bank menduduki posisi dominan dalam sistem ekonomi, khususnya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi (King dan Levine, 1993). *Kedua*, di negara yang ditandai oleh

pasar modal yang belum berkembang, bank berperan utama bagi sumber pembiayaan perusahaan. *Ketiga*, bank merupakan lembaga pokok dalam mobilisasi simpanan nasional. *Keempat*, liberalisasi sistem perbankan baik melalui privatisasi maupun deregulasi ekonomi menyebabkan manajer bank memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menjalankan operasi bank (Arun, Turner, 2003 dalam Supriyatno 2006).

Sebagaimana dikemukakan oleh Caprio dan Levine (2002), terdapat dua hal yang saling terkait menyangkut lembaga intermediasi keuangan perbankan yang berpengaruh terhadap *corporate governance*. Pertama, bank merupakan sektor usaha yang tidak-transparan, sehingga memungkinkan terjadinya masalah keagenan. Kedua, bank merupakan sektor usaha yang memiliki tingkat regulasi tinggi yang dalam hal tertentu justru menghambat mekanisme *corporate governance*. Masalah keagenan dalam sektor keuangan-perbankan pada hakekatnya dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama masalah keagenan akibat utang (*debt agency problem*) dan kedua masalah keagenan akibat pemisahan kepemilikan dan pengendalian (*separation of ownership and control*).

Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak

sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*) (Haris, 2004). Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) (Richardson, 1998).

Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan (*alignment*) berbagai kepentingan tersebut. Pertama, dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*managerial ownership*) (Jensen dan Meckling, 1976), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer. Kedua, kepemilikan saham oleh investor institusional. Moh'd *et al.* (1998) dalam Midiastuti dan Mackfudz (2003) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang. Ketiga, melalui peran monitoring oleh dewan komisaris (*board of directors*). Dechow *et al.* (1996) dan Beasley (1996) menemukan hubungan yang signifikan antara peran dewan komisaris dengan pelaporan keuangan. Mereka menemukan bahwa ukuran dan independensi dewan komisaris mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitor proses pelaporan keuangan. Nama besar, kemauan dan itikad baik saja belum cukup untuk membangun dewan komisaris berkelas dunia, dibutuhkan struktur, sistem dan proses yang memadai. Dewan komisaris harus berperan aktif, independen dan konstruktif. (Alijoyo, A, 2004).

Dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan (Kieso dan Weygandt, 1995), sehingga laba yang tinggi belum tentu mencerminkan kas yang besar. Dalam hal ini arus kas mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan di masa mendatang. Arus kas (*Cash Flow*) menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai dan benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan (Pradhono, 2004).

Cash flow return on assets (CFROA) merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. CFROA lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat ini dan CFROA tidak terikat dengan harga saham (Cornett *et al.*, 2006). Laporan keuangan sebagai produk informasi yang dihasilkan perusahaan, tidak terlepas dari proses penyusunannya. Kebijakan dan keputusan yang diambil dalam rangka proses penyusunan laporan keuangan akan mempengaruhi penilaian kinerja perusahaan. Menurut Theresia (2005) manajemen laba merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Manajemen akan memilih metode tertentu untuk mendapatkan laba yang sesuai dengan motivasinya. Hal ini akan mempengaruhi kualitas kinerja yang dilaporkan oleh manajemen (Boediono, 2005).

Sistem *corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh *return* atas

investasinya dengan benar. *Corporate governance* juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan *sustainable* di sektor korporat. *Corporate governance* dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya (FCGI, 2003).

Penelitian mengenai efektifitas *corporate governance* dalam melindungi investor di Indonesia telah banyak dilakukan, antara lain: Midiastuty dan Machfoedz (2003), Veronica dan Bachtiar (2004), Wedari (2004), dan Wilopo (2004), Boediono (2005), Veronica dan Utama (2005), Sugiarta (2004). Akan tetapi penelitian ini mencakup perusahaan yang listing di BEJ kecuali perusahaan perbankan. Oleh karena itu, perlu suatu penelitian tentang efektifitas *corporate governance* di industri perbankan karena karakteristik industri perbankan yang berbeda dengan industri lainnya.

Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lain, misalnya suatu bank harus memenuhi kriteria CAR minimum. Bank Indonesia menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam penentuan status suatu bank (apakah bank tersebut merupakan bank yang sehat atau tidak). Oleh karena itu, manajer mempunyai insentif untuk melakukan manajemen laba supaya perusahaan mereka dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh BI (Setiawati dan Na'im, 2001, dan Rahmawati dan Baridwan, 2006). Setiawati dan Na'im (2001), Rahmawati (2006), dan Rahmawati dan Baridwan (2006) menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia melakukan manajemen laba untuk memenuhi kriteria BI

tersebut. Setiawati dan Na'im (2001) berargumen bahwa laporan keuangan yang telah direkayasa oleh manajemen dapat mengakibatkan distorsi dalam alokasi dana. Selain itu, industri perbankan merupakan industri "kepercayaan". Jika investor berkurang kepercayaannya karena laporan keuangan yang bias karena tindakan manajemen laba, maka mereka akan melakukan penarikan dana secara bersama-sama yang dapat mengakibatkan *rush*. Oleh karena itu, perlu suatu mekanisme untuk meminimalkan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan perbankan. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah praktik *corporate governance*.

Berbagai tulisan memaparkan konsekuensi negatif dari *weak governance system* dan berusaha mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang dapat meningkatkan implementasi *corporate governance*. Iskander dan Chamlou (2000) dalam Alijoyo (2004) misalnya, menyampaikan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan negara lain terjadi bukan hanya akibat faktor ekonomi makro namun juga karena lemahnya *corporate governance* yang ada di negara-negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan (auditing) yang belum mapan, pasar modal yang masih *under-regulated*, lemahnya pengawasan komisaris, dan terabaikannya hak minoritas.

Dengan bisa terukurnya praktik *corporate governance* di tingkat perusahaan, banyak penelitian yang berhasil menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan nilai/kinerja perusahaan (antara lain, Black dkk., 2003; Klapper dan Love, 2002; Mitton, 2000; dan Darmawati dkk., 2004). Penelitian-penelitian tersebut secara tidak langsung juga menunjukkan kegunaan (*usefulness*)

dari pemeringkatan praktik *corporate governance* di tingkat perusahaan yang sudah dilakukan di beberapa negara (termasuk Indonesia).

Menurut Berghe dan Ridder (1999) dalam penelitian sebelumnya, menghubungkan kinerja perusahaan dengan *good corporate governance* tidak mudah dilakukan. Beberapa penelitian menunjukkan tidak ada hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan, misalnya penelitian Daily dkk. (1998) dan hasil survey CBI, Deloitte dan Touche (1996) sebagaimana yang dikutip oleh Darmawati dkk (2004). Demikian juga dengan Young (2003) yang menganalisis beberapa penelitian yang menghubungkan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Di lain pihak, berdasarkan beberapa hasil penelitian, Berghe dan Ridder menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai *poor performance* disebabkan oleh *poor governance*. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Gompers dkk (2003) dalam Darmawati (2004) yang menemukan hubungan positif antara indeks *corporate governance* dengan kinerja perusahaan jangka panjang.

Menurut Kakabadse dkk, (2001) dalam Darmawati, (2004) perbedaan hasil penelitian tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 1) perspektif teoritis yang diterapkan 2) metodologi penelitian, 3) pengukuran kinerja, dan 4) perbedaan pandangan atas keterlibatan dewan dalam pengambilan keputusan. Walaupun penelitian-penelitian tentang hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan menunjukkan hasil yang berbeda, namun semuanya menyatakan bahwa *corporate governance* mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap kinerja perusahaan.

Kepemilikan oleh institusional juga dapat menurunkan *agency costs*, karena dengan adanya *monitoring* yang efektif oleh pihak institusional menyebabkan penggunaan utang menurun, Moh'd *et al.* (1998) dalam Midiastuti dan Machfudz, (2003). Namun Faisal (2005) menyatakan bahwa hubungan antara kepemilikan institusional dengan biaya keagenan (*agency costs*) adalah negative, kepemilikan institusional belum efektif sebagai alat memonitor manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan.

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam. makin banyaknya personel yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan (Yermack 1996, Eisenberg, Sundgren, dan Wells 1998, dan Jensen 1993). Beberapa peneliti lain menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba, makin sedikit dewan komisaris maka tindak kecurangan makin banyak karena sedikitnya dewan komisaris memungkinkan bagi organisasi tersebut (Yu (2006), Chtourou, Bedard, dan Courteau (2001) dan Xie, Davidson, dan Dadalt (2003).

Berkaitan dengan ukuran dewan direksi, beberapa peneliti menemukan hasil yang berbeda. Dalton *et al.* (1999) menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan direksi dengan kinerja perusahaan. Sedangkan Eisenberg *et al.* (1998) menyatakan bahwa ada hubungan yang negatif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan.

Penelitian mengenai dampak dari independensi dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan ternyata masih beragam. Ada penelitian yang menyatakan bahwa

tingginya proporsi dewan luar berhubungan positif dengan kinerja perusahaan (Yermack, 1996; Daily & Dalton, 1993), bukan merupakan faktor dari kinerja perusahaan (Kesner & Johnson, 1990), dan berhubungan negatif dengan kinerja (Baysinger, Kosnik & Turk, 1991; Goodstein & Boeker, 1991).

Hubungan antara struktur modal dengan kualitas *corporate governance* suatu perusahaan terdapat dua alternatif penjelasan. Black dkk. (2003) dan Gillan dkk. (2003) berhasil menemukan adanya hubungan negatif antara *leverage* dan kualitas *corporate governance*. Durnev dan Kim (2003) justru berhasil menemukan adanya hubungan positif antara pemilihan perusahaan akan praktik *governance* dan pengungkapan berhubungan secara positif dengan kebutuhan perusahaan akan pendanaan eksternal. Penelitian Baruci dan Falini (2004) tidak berhasil menemukan adanya hubungan antara *leverage* dan kualitas *corporate governance*.

Adanya perbedaan-perbedaan hasil penelitian tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pada bank di Indonesia. Penelitian ini dimotivasi oleh penelitian Cornett *et al.* (2006) di Amerika Serikat, dengan objek penelitian pada industri perbankan di Indonesia. Konsep Indikator mekanisme *corporate governance* terdiri dari; ukuran dewan komisaris, dewan komisaris, ukuran komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan leverage.

Penelitian ini bertujuan menguji variabel *corporate governance* yang telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan bisnis di Indonesia (menggunakan ukuran yang dikembangkan oleh IICG). Dan diukur menggunakan *Cash flow return on assets* (CFROA).

1.2 Rumusan Masalah

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya agar perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan efisien. Dari beberapa penelitian terdahulu terdapat perbedaan mengenai hubungan antara *good corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan tidak ada hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan, Daily dkk. (1998) dan hasil survey CBI, Deloitte dan Touche (1996) sebagaimana yang dikutip oleh Darmawati dkk (2004). Di lain pihak menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai *poor performance* disebabkan oleh *poor governance*, adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan nilai/kinerja perusahaan (antara lain, Black dkk., 2003; Klapper dan Love, 2002; Mitton, 2000; dan Darmawati dkk., 2004).

Pertanyaan penelitian dari perumusan masalah tersebut adalah apakah mekanisme *corporate governance*, dalam hal ini kepemilikan institusional, aktifitas dewan komisaris, ukuran dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh *corporate governance* yang terdiri dari; kepemilikan institusional, aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, dan

leverage terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia yang diukur menggunakan *Cash flow return on assets* (CFROA).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pengembangan teori dan pengetahuan mengenai *agency theory* dan *corporate governance* serta konsekuensinya terhadap kinerja keuangan.
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi mengenai hubungan *corporate governance* dan kinerja manajemen terutama pada perusahaan yang telah memisahkan antara kepemilikan dan pengendalian.
3. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini juga bermanfaat kepada para pemegang saham dari perusahaan yang ingin mewujudkan konsep *Good Corporate Governance*. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan masukan kepada para pemakai laporan keuangan dan praktisi penyelenggara perusahaan dalam memahami mekanisme *corporate governance*, sehingga dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan perusahaan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN MODEL

2.1 Pengertian dan Konsep Dasar Good Corporate Governance (GCG)

Dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory* (Chinn,2000; Shaw,2003). *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan *fidusia* yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*. Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Jensen, M.C., and W. H. Meckling (1976) memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “agents” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.

Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki banyak definisi. *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan

antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Di kalangan pebisnis, secara umum, GCG diartikan sebagai tata kelola perusahaan. *Good corporate governance* (GCG) diartikan pula sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks, 2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance*, (Kaen, 2003; Shaw, 2003) yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Konsep *good corporate governance* baru populer di Asia. Konsep ini relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep *good corporate governance* baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999.

Kelompok negara maju (*Organization for Economic Cooperation and Development/OECD*) mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada *shareholder*-nya. Sedangkan menurut ADB (*Asian Development Bank*), GCG mengandung empat nilai utama, yaitu : *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*.

Dari berbagai definisi yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan :

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, RUPS dan para *stakeholder* lainnya.
2. Suatu sistem *Check and balance* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang : pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

Beberapa konsep tentang *corporate governance* antara lain yang dikemukakan oleh Shleifer and Vishny (1997) yang menyatakan *corporate governance* berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh *return* yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam. Iskandar dkk (1999) menyatakan bahwa *corporate governance* merujuk pada kerangka aturan dan peraturan yang memungkinkan *stakeholders* untuk membuat perusahaan memaksimalkan nilai dan untuk memperoleh *return*. Selain itu *corporate governance* merupakan alat untuk

menjamin direksi dan manajer (atau *insider*) agar bertindak yang terbaik untuk kepentingan investor luar (kreditur atau *shareholder*) (Prowse, 1998).

Pada April 1998, *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) telah mengeluarkan seperangkat prinsip *corporate governance* yang dikembangkan secara universal. Hal ini mengingat bahwa prinsip ini disusun untuk digunakan sebagai referensi di berbagai negara yang mempunyai karakteristik sistem hukum, budaya, dan lingkungan yang berbeda. Dengan demikian, prinsip yang *universal* tersebut akan dapat menjadi pedoman untuk semua negara atau perusahaan namun diselaraskan dengan sistem hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di negara masing-masing. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Fairness* (Keadilan)

Menjamin perlindungan hak-hak pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen para investor.

2. *Transparency* (Transparansi)

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.

3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.

4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial. (OECD, *Business Sector Advisory Group on Corporate governance*, 1998)

Implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam lingkup pasar modal di Indonesia dapat dijabarkan melalui upaya-upaya Bapepam mendorong perusahaan publik untuk memperhatikan dan melaksanakan prinsip-prinsip: *transparancy*, dengan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi tentang “*Performance*” perusahaan secara tepat waktu, baik yang berupa informasi finansial maupun non-finansial. *Fairness*, dengan memaksimalkan perlindungan hak dan perlakuan adil kepada seluruh *shareholders* tanpa kecuali. *Responsibility*, dengan mendorong optimalisasi peran *stakeholders* dalam rangka mendukung program-program perusahaan. *Accountability*, dengan mendorong optimalisasi peran dewan direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional (Baridwan, 2003). Wulandari (2005) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa indikator mekanisme *corporate governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan publik di Indonesia, baik indikator mekanisme *corporate governance* internal (jumlah dewan direksi, proporsi komisaris independen, dan *debt to equity*) maupun indikator mekanisme eksternal (kepemilikan institusional).

2.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa

hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*).

Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ali, 2002).

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris, 2004).

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan

tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ali, 2002).

Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Penelitian Richardson (1998) menunjukkan adanya hubungan positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba.

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

Perbankan adalah suatu industri yang mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan industri yang lain seperti manufaktur, perdagangan, dan sebagainya sehingga teori keagenan pada perusahaan perbankan mempunyai karakteristik sendiri.

Perbankan adalah industri yang sarat dengan berbagai regulasi, hal ini karena bank adalah suatu lembaga perantara keuangan yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Karena fungsinya tersebut maka risiko yang harus dihadapi bank sangat besar, ketidakmampuan untuk menjaga *image* (kualitas) akan sangat berpengaruh terhadap likuiditas bank.

Dengan adanya regulasi di dalam perbankan mengakibatkan hubungan keagenan industri ini berbeda dengan hubungan keagenan dalam perusahaan yang tidak teregulasi (Ciancenelli & Gonzales, 2000 dalam Supriyatno, 2006). Dengan adanya regulasi tersebut maka ada pihak lain yang terlibat dalam hubungan keagenan yaitu regulator dalam hal ini pemerintah melalui Bank Indonesia sehingga mengakibatkan masalah keagenan menjadi semakin kompleks. *Moral hazard* terhadap suatu regulasi yang muncul lebih menunjukkan lemahnya peraturan dibandingkan konflik antara manajer dan pemilik.

Dengan deregulasi justru akan semakin memperbesar *moral hazard* karena di satu sisi memberikan kebebasan bank untuk mengambil risiko bisnis yang lebih besar dan di pihak lain, regulator menanggung sebagian risiko ini dari komitmen yang tidak dapat dipenuhi oleh bank karena regulator merupakan lembaga pemberi dana terakhir. Dalam teori keagenan, paling sedikit ada 3 asumsi yang mendasari (Ciancenelli & Gonzales, 2000 dalam Supriyatno, 2006), yaitu (1) pasar yang normal dan kompetitif, (2) *nexus* dari asimetri informasi adalah hubungan prinsipal-agen antara pemilik dan manajer, (3) struktur modal optimal menghendaki alat yang terbatas (*Miller & Modigliani theorems*). Jika asumsi-asumsi tersebut di atas diterapkan dalam perbankan, maka ketiga asumsi di atas tidak akan terpenuhi semua

sebab bank sangat teregulasi sehingga tidak akan tercapai pasar yang normal dan kompetitif.

Dengan adanya struktur modal yang kompleks di dalam perbankan maka paling sedikit ada tiga hubungan keagenan yang dapat menimbulkan asimetri informasi (Ciancenelli & Gonzales, 2000 dalam Supriyatno, 2006) yaitu: (1) hubungan antara deposan, bank dan regulator, (2) hubungan antara pemilik, manajer, dan regulator, serta (3) hubungan antara peminjam (*borrowers*), manajer, dan regulator. Dari ketiga macam hubungan tersebut, dalam setiap hubungan pasti melibatkan regulator sehingga bank dalam bertindak akan memenuhi kepentingan regulator lebih dahulu dibandingkan pihak yang lain.

2.2.1. Kepemilikan Institusional

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan (*agency conflict*). Crutchley dan Hansen (1989), Bathala *et al.* (1994) dalam Faisal (2005) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan.

Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap *agency costs* dilakukan oleh Crutchley *et al.* (1999). Crutchley menyatakan bahwa kepemilikan oleh institusional juga dapat menurunkan *agency costs*, karena dengan adanya *monitoring* yang efektif oleh pihak institusional menyebabkan penggunaan utang menurun. Hal ini karena peranan utang sebagai salah satu alat *monitoring*

sudah diambil alih oleh kepemilikan institusional. Dengan demikian kepemilikan institusional dapat mengurangi *agency cost of debt*.

Moh'd *et al.* (1998) dalam Midiastuti dan Mackfudz (2003) menyatakan bahwa distribusi saham antara pemegang saham dari luar yaitu investor institusional dan *shareholders dispersion* dapat mengurangi *agency costs*. Adanya kepemilikan institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2005) diperoleh hasil yang berbeda. Faisal (2005) menyatakan bahwa hubungan antara kepemilikan institusional dengan biaya keagenan (*agency costs*) adalah negatif. Masih berdasarkan hasil penelitian Faisal (2005) bahwa hal ini mengindikasikan kepemilikan institusional belum efektif sebagai alat memonitor manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan. Dalam penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₁ : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.2.2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam

mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan. Yang terpenting dalam hal ini adalah kemandirian komisaris dalam pengertian bahwa Dewan Komisaris harus memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan manajemen, dilengkapi dengan informasi yang memadai untuk mengambil keputusan, dan berpartisipasi secara aktif dalam penetapan agenda dan strategi. Dewan Komisaris merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas Egon Zehnder International, 2000 hal.12-13).

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris (NCCG, 2001). Selain mensupervisi dan memberi nasihat pada dewan direksi sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995, fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang dinyatakan dalam *National Code for Good Corporate Governance* 2001 adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai

stakeholder perusahaan sebaik memonitor efektifitas pelaksanaan *good corporate governance*.

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam. Salah satu argumen menyatakan bahwa makin banyaknya personel yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan (Yermack 1996, Eisenberg, Sundgren, dan Wells 1998, dan Jensen 1993). Hal tersebut dapat dijelaskan dengan adanya *agency problems* (masalah keagenan), yaitu dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan (Yermack 1996, Jensen 1993).

Adanya kesulitan dalam perusahaan dengan anggota dewan komisaris yang banyak ini membuat sulitnya menjalankan tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang nantinya berdampak pula pada kinerja perusahaan yang semakin menurun (Yermack 1996, Eisenberg, Sundgren, dan Wells 1998). Terkait kinerja, ukuran dewan komisaris dapat memberi efek yang berkebalikan dengan efek terhadap kinerja. Kondisi ini tidak diikuti oleh beberapa penelitian. Yu (2006) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba yang diukur dengan menggunakan model Modified Jones untuk memperoleh nilai akrual kelolaannya. Hal ini menandakan bahwa makin sedikit dewan komisaris maka tindak kecurangan makin banyak karena sedikitnya

dewan komisaris memungkinkan bagi organisasi tersebut untuk didominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya. Chtourou, Bedard, dan Courteau (2001) juga menyatakan hal yang sama dengan Yu (2006). Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Zhou dan Chen (2004) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris di bank komersial tidak berpengaruh terhadap *earnings management* yang diukur dengan menggunakan *loan loss provisions*. Pengujian tersebut menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris secara signifikan berpengaruh dalam menghalangi tindak kecurangan dalam bentuk manajemen laba untuk perusahaan yang melakukan manajemen laba tinggi. Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) juga menyatakan hal yang sama yaitu makin banyak dewan komisaris maka pembatasan atas tindak kecurangan dapat dilakukan lebih efektif.

Hasil yang sejalan dengan Yermack 1996, Eisenberg, Sundgren, dan Wells 1998, dan Jensen 1993 diantaranya Beasley (1996) yang melaporkan bahwa pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah positif secara signifikan. Untuk itu penelitian ini mendukung bahwa dewan komisaris yang lebih banyak kurang efektif dalam melakukan pengendalian terhadap manajemen. Penelitian Midiastuty dan Machfoedz (2003) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap indikasi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pengaruh tersebut ditunjukkan dengan tanda positif. Hal tersebut berarti makin besar ukuran dewan komisaris maka makin banyak kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan, dan pada akhirnya akan menurunkan kinerja manajemen. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah komisaris yang lebih

banyak lebih mampu mengurangi indikasi kinerja manajemen daripada jumlah komisaris yang sedikit.

Jensen (1993) dan Lipton dan Lorsch (1992) dalam Beiner, Drobetz, Schmid dan Zimmermann (2003) merupakan yang pertama menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance*. Hal ini diperkuat oleh pendapat Allen dan Gale (2000) dalam Beiner *et al.* (2003) yang menegaskan bahwa dewan komisaris merupakan mekanisme *governance* yang penting. Dalam penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan adalah:

H₂ : Aktifitas (rapat) dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.2.3. Ukuran Dewan Direksi

Dengan adanya pemisahan peran antara pemegang saham sebagai prinsipal dengan manajer sebagai agennya, maka manajer pada akhirnya akan memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam hal bagaimana mereka mengalokasikan dana investor (Jensen & Meckling, 1976; Shleifer & Vishny, 1997). Selain itu Mizruchi (1983 dalam Midiastuti dan Mackfudz (2003)) juga menjelaskan bahwa dewan merupakan pusat dari pengendalian dalam perusahaan, dan dewan ini merupakan penanggung jawab utama dalam tingkat kesehatan dan keberhasilan perusahaan secara jangka panjang (Louden, 1982 dalam Midiastuti dan Mackfudz (2003)).

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Pentingnya dewan (baik dewan direksi maupun dewan komisaris) tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan baru, berapa banyak dewan yang dibutuhkan

perusahaan? Apakah dengan semakin banyak dewan berarti perusahaan dapat meminimiliasi permasalahan agensi antara pemegang saham dengan direksi? Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resources dependence* (Alexander, Fernell, Halporn, 1993; Goodstein, Gautarn, Boeker, 1994; Mintzberg, 1983). Maksud dari pandangan *resources dependence* adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik. Pfeffer & Salancik (1978) dalam Bugshan (2005) juga menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi. Sedangkan kerugian dari jumlah dewan yang besar berkaitan dengan dua hal, yaitu: meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan semakin meningkatnya jumlah dewan dan turunnya kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen, sehingga menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan kontrol (Jensen, 1993; Yermack, 1996).

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang kecil sehingga nilai perusahaan yang memiliki dewan yang banyak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki direksi lebih sedikit (Jensen, 1993; Lipton and Lorsch, 1992; Yermack, 1996). Dalton et al. (1999) menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan. Sedangkan Eisenberg et al. (1998) menyatakan bahwa ada hubungan yang negatif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan, dengan menggunakan sampel perusahaan di

Finlandia. Jadi, dewan merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting dalam CG, dimana keberadaannya menentukan kinerja perusahaan. Bukti yang menyatakan efektifitas ukuran dewan masih berbaur. Dari hasil yang masih belum konklusif tersebut dapat dikatakan bahwa pengaruh ukuran direksi terhadap kinerja perusahaan akan tergantung dari karakteristik dari masing-masing perusahaan terkait. Kaitan tersebut terutama dengan karakteristik perusahaan secara keuangan. Efektifitas direksi dalam menghasilkan kinerja akan berbeda bagi perusahaan yang sehat secara keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang sedang dalam masalah keuangan. Mengingat fungsi dewan direksi, maka penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₃: Ukuran dewan direksi, berpengaruh positif terhadap kinerja

2.2.4. Dewan Komisaris Independen

Salah satu permasalahan dalam penerapan CG adalah adanya CEO yang memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan dewan komisaris. Padahal fungsi dari dewan komisaris ini adalah untuk mengawasi kinerja dari dewan direksi yang dipimpin oleh CEO tersebut. Efektivitas dewan komisaris dalam menyeimbangkan kekuatan CEO tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat independensi dari dewan komisaris tersebut (Lorsch, 1989; Mizruchi, 1983; Zahra & Pearce, 1989).

Penelitian mengenai dampak dari independensi dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan ternyata masih beragam. Ada penelitian yang menyatakan bahwa tingginya proporsi dewan luar berhubungan positif dengan kinerja perusahaan

(Yermack, 1996; Daily & Dalton, 1993; Stearn & Mizruchi, 1993), bukan merupakan faktor dari kinerja perusahaan (Kesner & Johnson, (1990) dalam Bugshan (2005), dan berhubungan negatif dengan kinerja (Baysinger, Kosnik & Turk, 1991; Goodstein & Boeker, 1991).

Konteks independensi ini menjadi semakin kompleks dalam perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Pfeffer & Salancik (1978) menyatakan bahwa dengan semakin meningkatnya tekanan dari lingkungan perusahaan maka kebutuhan akan dukungan dari luar juga semakin meningkat. Selain itu, Daily & Dalton (1994) menyatakan bahwa apabila ada resistensi dari CEO untuk menerapkan strategi yang agresif untuk mengatasi kinerja perusahaan yang terus menurun, maka adanya direksi dari luar akan mendorong pengambilan keputusan untuk melakukan perubahan. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan bahwa semakin tinggi representasi dewan dalam (*insider board*) maka keterlibatan direksi dalam pengambilan keputusan yang strategis akan semakin rendah (Judge & Zeithaml, 1992).

Penelitian mengenai keberadaan dewan komisaris telah dilakukan diantaranya Peasnell, Pope, dan Young (1998) meneliti efektifitas dewan komisaris dan komisaris independen terhadap manajemen laba yang terjadi di Inggris. Dengan menggunakan sampel penelitian yang terdiri dari 1178 perusahaan selama periode tahun 1993-1996, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen membatasi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba. Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) meneliti peran dewan komisaris dengan latar belakang bidang keuangan dalam mencegah manajemen laba. Dari penelitian ini diketahui

makin sering dewan komisaris bertemu maka akrual kelolaan perusahaan makin kecil. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien negatif yang signifikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa persentase dewan komisaris dari luar perusahaan yang independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap akrual kelolaan. Beasley (1996) menyarankan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan.

Penelitian terkait dengan keberadaan dewan komisaris di Indonesia juga banyak dilakukan. Veronica dan Utama (2005) meneliti pengaruh praktik *corporate governance* terhadap manajemen laba. Praktik *corporate governance* yang diteliti yaitu proporsi dewan komisaris independen. Hasil dari penelitian ini adalah kesimpulan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Boediono (2005) meneliti apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa secara parsial pengaruh *corporate governance* dalam hal ini komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Veronica dan Bachtiar (2004) menemukan bahwa variabel persentase dewan komisaris independen tidak berkorelasi secara signifikan terhadap akrual kelolaan, walau begitu interaksi antar variabel akrual kelolaan dan dewan komisaris independen menunjukkan koefisien positif yang signifikan terhadap *return* perusahaan. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan makin tingginya persentase dewan komisaris independen maka akrual kelolaan makin berpengaruh terhadap *return*.

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

Hasil penelitian Dechow, Patricia, Sloan dan Sweeney (1996), Klein (2002), Peasnell, Pope dan Young (2001), Chtourou *et al.* (2001), Midiastuti dan Mackfudz (2003), dan Xie, Biao, Wallace dan Peter (2003) memberikan simpulan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau *outside director* dapat mempengaruhi kinerja. Sehingga, jika anggota dewan komisaris dari luar meningkatkan tindakan pengawasan, hal ini juga akan berhubungan dengan makin rendahnya penggunaan *discretionary accruals* (Cornett *et al.*, 2006). Dalam penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₄ : Ukuran dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.2.5. Komite Audit

Komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan

manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal.

Penelitian mengenai komite audit ada yang mengindikasikan kurang efektifnya keberadaan komite audit sebagai salah satu praktek *corporate governance* di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEJ. Mayangsari (2003) meneliti pengaruh keberadaan komite audit terhadap integritas laporan keuangan, disimpulkan bahwa keberadaan komite audit berhubungan negatif dengan integritas laporan keuangan. Sedangkan Nuryanah (2004) dalam Effendi (2005) menemukan bahwa komite audit tidak mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. Namun Effendi (2005) menyimpulkan adanya peranan komite audit dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian.

Klein (2002) memberikan bukti secara empiris bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen melaporkan laba dengan kandungan akrual diskresioner yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit independen. Kandungan *discretionary accruals* tersebut berkaitan dengan kualitas laba perusahaan. Price Waterhouse (1980) dalam Mc.Mullen (1996) menyatakan bahwa investor, analis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan. Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui: (1) pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum, dan (2) mengawasi proses audit secara keseluruhan. Hasilnya mengindikasikan bahwa adanya komite audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan yaitu: (1) berkurangnya pengukuran akuntansi

yang tidak tepat, (2) berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat dan (3) berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komite audit dapat mengurangi aktivitas *earning management* yang selanjutnya akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang salah satunya adalah kualitas laba. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesa keempat yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₅: Keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.2.6. Tingkat Leverage perusahaan

Leverage adalah hutang sumber dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya diluar sumber dana modal atau ekuitas. Leverage dibagi menjadi dua yaitu leverage operasi (*operating leverage*) dan leverage keuangan (*financial leverage*). Leverage operasi adalah suatu indikator perubahan laba bersih yang diakibatkan oleh besarnya volume penjualan sedangkan leverage keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dengan *equity* yang dimilikinya.

Hutang merupakan perjanjian antara perusahaan sebagai debitur dengan kreditur. Dalam perjanjian hutang ini, ada kepentingan perusahaan untuk dinilai positif oleh kreditur dalam hal kemampuan membayar hutangnya. Sehingga hipotesa dari penelitian sebelumnya selalu menyatakan bahwa adanya perjanjian kontrak hutang memicu manajemen untuk meningkatkan *discretionary accrual*nya dengan tujuan memperlihatkan kinerja positif pada kreditur, sehingga memperoleh suntikan dana atau untuk memperoleh penjadwalan kembali pembayaran hutang.

Zuhroh (1996) dalam Suwito dan Herawaty (2005) meneliti faktor-faktor yang mendorong terjadinya perataan laba dengan kesimpulan bahwa hanya leverage operasi perusahaan saja yang memiliki pengaruh terhadap praktik perataan laba yang dilakukan perusahaan di Indonesia. Penelitian Suwito dan Herawaty (2005) menguji hubungan antara leverage operasi dengan praktek perataan laba yang dilakukan perusahaan di Indonesia. Tetapi hasil pengujian menunjukkan bahwa leverage operasi perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan perataan laba. Menurut Black dkk. (2003) terdapat dua alternatif penjelasan tentang hubungan antara struktur modal dengan kualitas *corporate governance* suatu perusahaan. Pandangan pertama menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi dalam struktur modalnya akan cenderung menjadi subjek untuk dikenai pengawasan oleh kreditor yang lebih ketat yang biasanya dinyatakan dalam kontrak utang yang dibuat. Dengan demikian, perusahaan kurang begitu mementingkan kualitas *corporate governance*, karena sudah ada pengawasan dari pihak eksternal yang disebut sebagai *a substitution story*.

Alternatif penjelasan yang kedua adalah bahwa kreditor sangat berkepentingan dengan praktik *governance* dari debiturnya dan memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan pemegang saham untuk memaksa perusahaan meningkatkan kualitas *corporate governance* perusahaan. Penjelasan tersebut disebut sebagai *an investor pressure story*.

Black dkk. (2003) dan Gillan dkk. (2003) berhasil menemukan adanya hubungan negatif antara *leverage* dan kualitas *corporate governance*. Durnev dan Kim (2003) justru berhasil menemukan adanya hubungan positif antara pemilihan

perusahaan akan praktik *governance* dan pengungkapan berhubungan secara positif dengan kebutuhan perusahaan akan pendanaan eksternal. Penelitian Baruci dan Falini (2004) dalam Suwito, Herawaty (2005) tidak berhasil menemukan adanya hubungan antara *leverage* dan peningkatan kinerja.

Dalam teori keuangan perusahaan (*corporate finance*) disebutkan bahwa penggunaan utang bagi perusahaan mendorong beberapa manfaat bagi perilaku manajer: (i) utang menjadi alat insentif bagi manajer untuk bekerja lebih keras guna menghindarkan ancaman risiko kebangkrutan usaha (Grossman dan Hart, 1986), (ii) utang mendorong manajer untuk menyerahkan arus kas bebas (*free cash flow*) kepada pemegang saham yang selanjutnya digunakan untuk membayar kembali kewajiban utang atau untuk keperluan reinvestasi (Jensen, 1986), (iii) utang berperan dalam mengurangi insentif manajer untuk melakukan konsumsi tambahan yang berlebihan (*excessive perquisite consumption*) (Megginson, 1997).

Bagi sektor perbankan yang sebagian besar operasi usahanya ditopang oleh utang dari penyimpan (antara lain: tabungan, deposito masyarakat), manfaat tersebut perlu mendapat telaah lebih lanjut. Justru sebaliknya, utang bagi bank dapat menimbulkan masalah keagenan yang cukup serius. Hal ini disebabkan oleh keputusan-keputusan keuangan akan diambil oleh pemilik (lewat pihak manajemen yang diangkat oleh pemilik) sedemikian rupa sehingga apabila keputusan tersebut ternyata bekerja dengan baik, maka manfaatnya akan dinikmati oleh seluruh pemilik perusahaan, tetapi bila gagal, pemberi kredit (dalam industri perbankan, para penyimpan) diminta untuk ikut menanggung kerugian tersebut (Husnan, 2001). Dengan kata lain, masalah keagenan ini timbul sebagai akibat adanya perilaku

penyimpangan moral oleh pemegang saham (*shareholders*) untuk memaksimalkan keuntungan dengan cara meningkatkan risiko usaha atas beban pemilik dana (*bondholders*). Dalam industri perbankan, pemilik dana (*bond holders*) dapat diartikan sebagai para penyimpan.

Terlebih lagi, dengan adanya penjaminan simpanan, para penyimpan cenderung bersikap pasif dalam melakukan pengendalian untuk mencegah setiap usaha peningkatan risiko yang dilakukan oleh pemegang saham (Merton, 1977 dalam Bugshan 2005). Hal ini semakin mendorong pemegang saham bank untuk meningkatkan risiko usaha dengan melakukan penggeseran risiko (*risk shifting*). Fungsi pengendalian sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjamin simpanan (*deposit insurer*). Mengingat penjamin simpanan belum tentu dapat melakukan pengendalian sepenuhnya maka setiap kerugian bank yang timbul pada akhirnya ditanggung oleh para pembayar pajak, dalam hal ini masyarakat (Kane, 1986, 1987 dalam Bugshan 2005). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian keenam yang berhasil dikembangkan adalah:

H₆ : *Leverage* perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan

2.3. Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan

Manajemen laba dilakukan oleh manajer pada faktor-faktor fundamental perusahaan, yaitu dengan intervensi pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan akuntansi akrual. Padahal kinerja fundamental perusahaan tersebut digunakan oleh pemodal untuk menilai prospek perusahaan, yang tercermin pada kinerja saham. Manajemen laba yang dilakukan manajer pada laporan keuangan tersebut akan

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja saham (Haris, 2004).

Bryshaw dan Eldin (1989) menemukan bukti bahwa alasan manajemen melakukan manajemen laba adalah: (1) skema kompensasi manajemen yang dihubungkan dengan kinerja perusahaan yang disajikan dalam laba akuntansi yang dilaporkan; serta (2) fluktuasi dalam kinerja manajemen dapat mengakibatkan intervensi pemilik untuk mengganti manajemen dengan pengambilalihan secara langsung. Cornett *et al.*, (2006) menemukan adanya pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap penurunan *discretionary accruals* sebagai ukuran dari manajemen laba dan berhubungan positif dengan CFROA. Hasil ini diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa CFROA merupakan fungsi positif dari indikator mekanisme *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* dapat mengurangi dorongan manajer melakukan *earnings management*, sehingga CFROA yang dilaporkan merefleksikan keadaan yang sebenarnya.

Performance atau kinerja merupakan suatu pola tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diukur dengan berdasarkan pada suatu perbandingan dengan berbagai standar. Kinerja adalah pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar. Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan suatu metode atau pendekatan. Pengukuran kinerja perusahaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran kinerja non keuangan (*non financial performance measurement*) dan pengukuran kinerja keuangan (*financial performance*

measurement). (Morse dan Davis, 1996; Hirsch 1994:594-607 dalam Hiro Tugiman, 2000). Informasi yang digunakan dalam mengukur kinerja non keuangan adalah informasi yang disajikan tidak dalam satuan uang atau rupiah (*non financial information*) namun dengan satuan ukur non keuangan (Kaplan & Atkinson, 1998:551 dalam Bugshan 2005). Adapun informasi yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan adalah informasi keuangan (*financial information*), yaitu informasi akuntansi manajemen dan informasi akuntansi keuangan seperti laba sebelum pajak, tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya.

2.4. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hubungan *good corporate governance* dengan kinerja perusahaan memberikan hasil yang bervariasi. Beberapa penelitian menunjukkan tidak ada hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan, misalnya hasil penelitian Daily et al (1998), Kakabadse et al (2003) dan Young (2003).

Namun terdapat juga penelitian yang menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki *poor performance* disebabkan karena *poor governance*. Simpulan ini didukung oleh Gompers et al (2003) yang menemukan hubungan positif antara indeks *corporate governance* dengan kinerja perusahaan jangka panjang (dalam Darmawati dkk, 2006). Menurut Kakabadse (2001) perbedaan hasil penelitian tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: perspektif teoritis yang diterapkan, metodologi penelitian, pengukuran kinerja dan perbedaan pandangan atas keterlibatan dewan dalam pengambilan keputusan.

Faccio dan Ameziane (1999) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial dan struktur dewan dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang diukur menggunakan *return on equity* (ROE). Kang dan Asghar (2000) dalam penelitiannya ditemukan bukti bahwa terdapat hubungan secara signifikan antara struktur kepemimpinan dewan dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan *return on investment* (ROI). Maher dan Anderson (2001) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa *good corporate governance* selain dapat mempengaruhi kinerja perusahaan juga mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Lastanti (2004) menguji hubungan struktur *Corporate Governance* dengan kinerja perusahaan dan reaksi pasar dengan menggunakan variabel independensi dewan komisaris, struktur kepemilikan terkonsentrasi dan institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran independensi dewan komisaris sebesar 30% dari jumlah anggota dewan komisaris mempunyai hubungan positif terhadap nilai perusahaan (tobin's q) namun struktur kepemilikan (institusional dan terkonsentrasi) belum dapat mempengaruhi kinerja keuangan (ROA dan ROE) maupun nilai perusahaan secara signifikan.

Ana (2004) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara mekanisme *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan *Economic Value Added*. Mekanisme *corporate governance* yang digunakan adalah mekanisme monitoring organisasi (rangkap kepemimpinan dewan direksi dan dewan komisaris, serta proporsi komisaris independen), mekanisme insentif manajemen (kompensasi manajemen), dan mekanisme struktur kepemilikan (kepemilikan oleh dewan direksi, dewan komisaris, dan institusional). Wulandari

(2005) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa indikator mekanisme *corporate governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan publik di Indonesia, baik indikator mekanisme *corporate governance* internal (jumlah dewan direksi, proporsi komisaris independen, dan *debt to equity*) maupun indikator mekanisme eksternal (kepemilikan institusional).

Secara ringkas penelitian terdahulu dapat dipaparkan dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

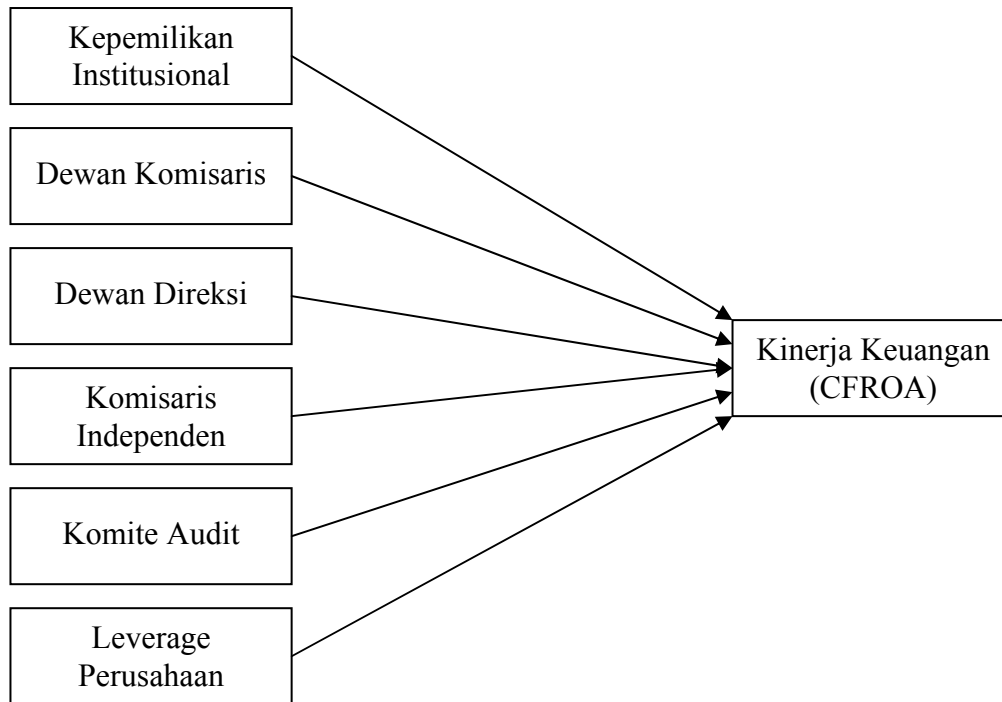
No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Deni Darmawati, Khomsiyah dan R. G. Rahayu. 2006.	Menunjukkan bahwa variabel <i>corporate governance</i> berpengaruh signifikan terhadap ROE namun tidak berpengaruh terhadap <i>tobin's q</i> . sedangkan variabel lain (sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh) baik terhadap ROE maupun <i>tobin's q</i> .
2.	Black, B.S., H. Jang and W. Kim. 2003.	Menunjukkan peningkatan sebesar 42% pada perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan menggunakan 2SLS dan 3SLS menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel <i>corporate governance</i> tiga kali lebih kuat dan lebih signifikan dibandingkan menggunakan OLS.
3.	Drobetz, W., Schillhofer, A. and Zimmermann, H. 2003	Memperlihatkan bahwa perusahaan yang memiliki peringkat <i>corporate governance</i> tinggi akan memiliki nilai perusahaan (<i>tobin's q</i>) yang tinggi pula. Pengaruhnya tidak hanya signifikan secara statistik namun juga sangat penting kekuatannya (<i>magnitude</i>) dari sudut pandang ekonomi.
4.	Gompers, P., Ishii, L. and Metrick, A. 2003.	Memperlihatkan bahwa perusahaan yang memiliki budaya <i>corporate governance</i> yang bagus (<i>democratic portfolio</i>) bisa memperoleh <i>return</i> tahunan 8,5 % lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang budaya <i>corporate governance</i> nya rendah (<i>dictator portfolio</i>). ditemukan hubungan positif antara indeks <i>corporate governance</i> dengan kinerja perusahaan jangka panjang.
5	Klapper, L.F. and Love, I. 2002.	Menemukan adanya pengaruh positif antara <i>corporate governance</i> terhadap kinerja dan nilai perusahaan dan perusahaan yang menerapkan <i>corporate governance</i> secara konsisten akan memperoleh manfaat yang lebih besar pada negara yang lingkungan hukumnya buruk.
6	La porta, Lopez de-Silanes, Shleifer (2002)	Sampel pada bank di 92 negara, kepemilikan bank pemerintah cukup ekstensif, terutama di negara berkembang. Perkembangan sistem keuangan yang lambat berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan

		produktifitas yang rendah.
7.	Lobo dan Yang (2001)	1658 observasi tahun bank periode 1980-1997. motif utama manajer melakukan manajemen laba diuji dengan cara ; <i>firm spesifik, time series, cross section</i> dan panel data, terbukti adanya <i>opportunistic hypotesis</i> , manajer menggunakan penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk memenuhi regulasi permodalan.
8.	Mitton, T. 2002.	Menunjukkan bahwa indikator-indikator yang berkaitan dengan <i>corporate governance</i> mempunyai dampak yang kuat terhadap kinerja perusahaan selama periode krisis di Asia (1997-1998).
9.	Mayang Sari, S. dan Murtanto. 2002.	Menguji apakah pengumuman pembentukan komite audit (komponen penting dalam <i>corporate governance</i> di Indonesia) direspon oleh pasar. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat reaksi pasar yang bersifat positif terhadap pengumuman tersebut.
10	Na'im dan Rakhman (2000)	Sampel 32 perusahaan di BEJ tahun 1996, dengan metodologi disklosur laporan keuangan, DER, kepemilikan oleh publik. Hasilnya kepemilikan berhubungan secara lemah dengan kelengkapan diklosur laporan keuangan
11	Supriyatno (2006)	145 bank periode 1999-2004, dengan variabel kepemilikan, corporate governance; kinerja, hasilnya ada perbedaan derajat konflik keagenan antar jenis kepemilikan.
11	Sulistiyanto, S. dan Prapti, M.S. 2003.	Membuktikan bahwa lima hari setelah pengumuman ARA, pasar merespon publikasi tersebut secara signifikan. Interpretasi yang dikemukakan adalah masyarakat percaya bahwa perusahaan publik penerima ARA telah menerapkan <i>corporate governance</i> dengan baik.
12.	Sulistiyanto, H.S. dan L.Y. Nugraheni. 2002.	Menunjukkan tidak terdapat perbedaan manipulasi sebelum dan sesudah adanya kewajiban menerapkan prinsip <i>corporate governance</i> dapat menekan manipulasi laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan publik.
14	Wulandari (2005)	indikator mekanisme <i>corporate governance</i> dapat meningkatkan kinerja perusahaan publik di Indonesia, baik indikator mekanisme <i>corporate governance</i> internal (jumlah dewan direksi, proporsi komisaris independen, dan <i>debt to equity</i>) maupun indikator mekanisme eksternal (kepemilikan institusional).

Sumber: Jurnal-jurnal yang diolah

2.5. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan pada gambar berikut:



Sumber: dikembangkan dengan justifikasi penelitian terdahulu

2.6. Perumusan Hipotesis

Dari telaah literatur yang dijelaskan pada bagian di atas, penelitian ini akan mengambil simpulan sementara sebagai hipotesis sebagai arah penelitian ini, yaitu:

H₁ : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan CFROA.

H₂ : Aktifitas dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan CFROA.

H₃ : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan CFROA.

- H₄ : Dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan CFROA.
- H₅ : Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan CFROA
- H₆ : Tingkat Leverage perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan CFROA.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

3.1.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank periode 2004-2007 yang dipublikasikan untuk umum serta tercantum dalam Direktori Perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Data penelitian yang mencakup data periode 2004-2007 dipandang cukup mewakili kondisi perbankan di Indonesia pada saat itu dan indikator-indikator keuangan perbankan pada periode itu.

3.1.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan menurut Direktori Perbankan Indonesia tahun 2006 jumlah bank ada 130, yang merupakan besarnya populasi dalam penelitian ini. Pemilihan populasi diambil dari bank publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang memiliki kriteria tertentu. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jumlah bank yang dijadikan sampel sesuai dengan kriteria ada 28 bank selama tahun 2004 – 2007. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan termasuk perusahaan yang sudah *go public* terdaftar di BEI mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2004 sampai dengan 2007,
2. Data yang tersedia lengkap, baik data mengenai *corporate governance* perusahaan dan data yang diperlukan untuk kinerja keuangan

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari laporan keuangan perusahaan perbankan selama periode tahun 2004 sampai tahun 2007 yang bisa dilihat dalam Laporan Publikasi Bank Indonesia, dari Direktori Perbankan Indonesia dan dipublikasikan oleh Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) yang terdapat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dari tahun 2004-2007, serta dari situs masing-masing perusahaan sampel.

3.1.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data dokumentasi yaitu data sekunder yang berupa annual report bank yang go publik dan yang dipublikasikan. Data laporan keuangan data *cross section* dari semua jenis bank yang diambil dan data *time series* untuk tahun 2004 -2007. Pengambilan data selama 4 (empat) periode tersebut dimaksudkan untuk dilakukan uji stabilitas antara regresi tahun 2004 - 2007.

3.1.4. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

1. Kepemilikan Institusional

Persentase saham institusi ini diperoleh dari penjumlahan atas persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun di luar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri.

2. Aktifitas Dewan Komisaris

Aktifitas dewan komisaris merupakan jumlah rapat dewan komisaris perusahaan (Beiner *et al*, 2003). Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan manajemen, dan memberikan nasehat kepada manajemen jika dipandang perlu oleh dewan komisaris (KNKG, 2004). Aktifitas dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah rapat dewan komisaris suatu perusahaan.

3. Dewan Direksi

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Jumlah anggota direksi disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat serta bertindak independen. Dewan Direksi diukur dengan jumlah anggota Dewan Direksi.

4. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak

semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2004). Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan.

5. Komite Audit

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal. Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit.

6. Rasio Leverage Perusahaan

Rasio leverage (*leverage ratios*) mengukur sejauh mana aktiva perusahaan telah dibiayai oleh penggunaan hutang. Tingginya rasio leverage terhadap aset menunjukkan semakin banyak aktiva yang didanai hutang pada pihak luar, dan menunjukkan resiko perusahaan dalam pelunasannya, sehingga menyebabkan insentif manajemen untuk merekayasa kinerja untuk menjaga kepercayaan dari pihak eksternal. *Leverage* diukur dengan menggunakan rasio total hutang terhadap total aktiva (Black dkk., 2003).

7. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merefleksikan kinerja fundamental perusahaan. Kinerja keuangan diukur dengan data fundamental perusahaan, yaitu data yang berasal dari laporan keuangan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan

menggunakan *cash flow return on asset* (CFROA). CFROA dihitung dari laba sebelum bunga dan pajak ditambah depresiasi dibagi dengan total aktiva.

$$CFROA = \frac{EBIT + Dep}{Assets}$$

Dimana :	CFROA	=	Cash Flow Return on Assets
	EBIT	=	Laba Sebelum Bunga dan Pajak
	Dep	=	Depresiasi
	Assets	=	Total Aktiva

3.2 Metode Analisis

3.2.1 Statistik Deskriptif

Untuk memberikan gambaran secara umum, data penelitian akan diadakan analisis statistik deskriptif mengenai variabel-variabel penelitian, yaitu kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, komposisi aktiva perusahaan dan kinerja keuangan. Deskripsi variabel tersebut disajikan dalam bentuk frekuensi absolut yang menyajikan angka rata-rata, median, kisaran dan standar deviasi.

3.2.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memenuhi sifat dari estimasi regresi yang meliputi:

1. Normalitas

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan grafik *normal probability plot* serta pengujian *one sample Kolmogorov Smirnov* untuk membandingkan

distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

2. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah tiap variabel independen saling berhubungan secara linear. Apabila sebagian atau seluruh variabel independen berkorelasi kuat berarti terjadi multikolinearitas. Uji multikolinearitas dapat dilihat dengan menghitung nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) dan *tolerance value* tiap-tiap variabel independen.

3. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah terjadinya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, dalam penelitian ini digunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

4. Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain (Ghozali, 2005). Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung nilai *Durbin Watson Test*.

3.2.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis pengaruh mekanisme *corporate governance* dan *leverage* terhadap kinerja (H_1 , H_2 , H_3 , H_4 , H_5 dan H_6) digunakan alat analisis regresi berganda. Model persamaan regresi tersebut sebagai berikut :

$$CSROA = \beta_0 + \beta_1 INST_OWN + \beta_2 RAPAT + \beta_3 DIR + \beta_4 INDEP + \beta_5 AUD + \beta_6 LEV + \varepsilon$$

CSROA = *Cash Flow Return on Assets*

INST_OWN = Kepemilikan Institusional

RAPAT = Aktivitas (rapat) Komisaris

DIR = Ukuran Direksi

INDEP = Ukukuran Dewan Komisaris Independen

AUD = Komite Audit

LEV = Leverage

β_0 = Konstanta

$\beta_1 - \beta_6$ = Koefisien regresi

ε = *error*

3.2.3.1 Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh rasio keuangan perbankan terhadap kinerja perbankan di Bursa Efek Jakarta. Oleh karena itu uji t ini digunakan untuk menguji hipotesis $Ha_1, Ha_2, Ha_3, Ha_4, Ha_5, Ha_6$ Langkah–langkah pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003):

a. Merumuskan hipotesis (H_a)

H_a diterima: berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (kinerja perbankan) secara parsial.

- b. Menentukan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05
- c. Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka H_a diterima.

Nilai t_{hitung} dapat dicari dengan rumus (Gujarati, 2003):

$$T_{hitung} = \frac{\text{Koefisien Regresi}}{\text{Standar Deviasi}}$$

1. Bila $-t_{tabel} < -t_{hitung}$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, variabel independen secara individu tak berpengaruh terhadap variabel dependen.
 2. Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $-t_{hitung} < -t_{tabel}$, variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen.
- d. Berdasarkan probabilitas

Ha akan diterima jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 (α)
 - e. Menentukan variabel independen mana yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen

Hubungan ini dapat dilihat dari koefisien regresinya.

3.2.3.2 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh kepemilikan institusional, aktifitas dewan komisaris, ukuran dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan leverage terhadap kinerja keuangan secara simultan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah (Gujarati, 2003):

1. Merumuskan Hipotesis (H_a)

Ha diterima: berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

2. Menentukan tingkat signifikansi yaitu sebesar 0.05 ($\alpha=0,05$)
3. Membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel}

Nilai F hitung dapat dicari dengan rumus (Gujarati, 2003):

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (N - k)}$$

dimana:

R^2 = Koefisien Determinasi

k = Banyaknya koefisien regresi

N = Banyaknya Observasi

1. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$, variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
 2. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$, variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
4. Berdasarkan Probabilitas
 Dengan menggunakan nilai probabilitas, H_a akan diterima jika probabilitas kurang dari 0,05
 5. Menentukan nilai koefisien determinasi, dimana koefisien ini menunjukkan seberapa besar variabel independen pada model yang digunakan mampu menjelaskan variabel dependennya.

3.2.3.3 Uji R²

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dicari dengan rumus (Gujarati, 2003):

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum Y_i^2}$$

Nilai koefisien determinansi adalah antara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2005). Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum dan Deskriptif Data Obyek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang tercatat di BEI periode 2004 hingga 2007. Pada periode ini terdapat 87 bank, akan tetapi setelah dilakukan *purposive sampling*, maka sampel yang layak digunakan (memenuhi kriteria) dalam penelitian ini ada 73 perusahaan perbankan yang tercatat di BEI. Data diambil dari *annual report* bank-bank tersebut, khususnya pada Laporan Perhitungan Rasio Keuangan. Terdapat 14 sampel digugurkan yaitu karena data bank tersebut tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan karena ketidaklengkapan data.

4.1.2. Deskriptif Statistik Variabel Penelitian

Berdasarkan hasil analisis deskripsi statistik, maka berikut didalam Tabel 4.2 akan ditampilkan karakteristik sampel yang digunakan didalam penelitian ini meliputi: jumlah sampel (N), rata-rata sampel (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum serta standar deviasi (σ) untuk masing-masing variabel.

Tabel 4.1.

Deskripsi Variabel Penelitian Bank-Bank Sample

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CFROA	73	,0038	,0596	,022023	,0131261
INST_OWN	73	,1136	1,0000	,730238	,2029494
KOMIS	73	3	50	11,48	11,193
DIR	73	3	10	6,12	2,166
K_INDEP	73	1	5	2,33	1,214
K_AUD	73	1	6	3,32	,911
LEV	73	,7832	,9517	,897362	,0398985
Valid N (listwise)	73				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2008

Pada tabel 4.1. diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 73 sampel data yang diambil dari Laporan Tahunan Publikasi industri perbankan yang tercatat di BEI periode 2004 hingga 2007.

Data rasio CFROA terendah (minimum) adalah 0,38 persen yaitu Bank Artha Graha International pada tahun 2005 dan yang tertinggi (maximum) 5,96 persen yaitu Bank Danamon pada periode juni 2004, kemudian rata-rata ROA sebesar 2,200 persen. Sementara standar deviasi sebesar 0,0131 menunjukkan simpangan data yang relative kecil, karena nilainya yang lebih kecil daripada nilai mean-nya yaitu sebesar 0,022. Dengan tidak besarnya simpangan data, menunjukkan bahwa data variabel CFROA dikatakan cukup baik.

Data rasio Kepemilikan Institusional terendah (minimum) adalah 11,36 persen yaitu Bank Himpunan Saudara pada tahun 2006 dan yang tertinggi (maximum) 100 persen yaitu Bank Bukopin serta Bank Artha Graha pada tahun 2005, kemudian rata-rata kepemilikan institusional sebesar 73,02 persen. Sementara standar deviasi

sebesar 20,29 persen menunjukkan simpangan data yang relative kecil, karena nilainya yang lebih kecil daripada nilai mean-nya.

Data aktivitas komisaris mempunyai tingkat terendah (minimum) adalah 3 (tiga) kali rapat yaitu Bank Buana Indonesia pada tahun 2006 dan yang rapat komisaris dengan intensitas paling tinggi (maximum) sebanyak 50 kali rapat, kemudian rata-rata rapat sebesar 11,43 kali dengan nilai standar deviasi sebesar 11,19 menunjukkan simpangan data yang relative kecil, karena nilainya yang lebih kecil daripada nilai mean-nya.

Data ukuran dewan direksi mempunyai tingkat terendah (minimum) adalah 3 direksi dan yang tertinggi (maximum) sejumlah 10 direksi, kemudian rata-rata ukuran dewan direksi sebesar 6,12 persen. Sementara standar deviasi sebesar 2,16 menunjukkan simpangan data yang relative kecil, karena nilainya yang lebih kecil daripada nilai mean-nya.

Data komisaris independen mempunyai nilai terendah (minimum) adalah 1 dan yang tertinggi (maximum) 5, kemudian secara keseluruhan rata-rata komisaris independen sebesar 2,33 persen. Sementara standar deviasi sebesar 1,21 menunjukkan simpangan data yang relative kecil, karena nilainya yang lebih kecil daripada nilai mean-nya.

Data rasio ukuran komite audit mempunyai nilai terendah (minimum) sebesar 1 orang dan yang tertinggi (maximum) sebanyak 5 orang, kemudian rata-rata komite audit sebesar 11,32 persen. Sementara standar deviasi sebesar 0,911 menunjukkan simpangan data yang relative kecil, karena nilainya yang lebih kecil daripada nilai

mean-nya. Dengan tidak besarnya simpangan data, menunjukkan bahwa data variabel komite audit dikatakan cukup baik.

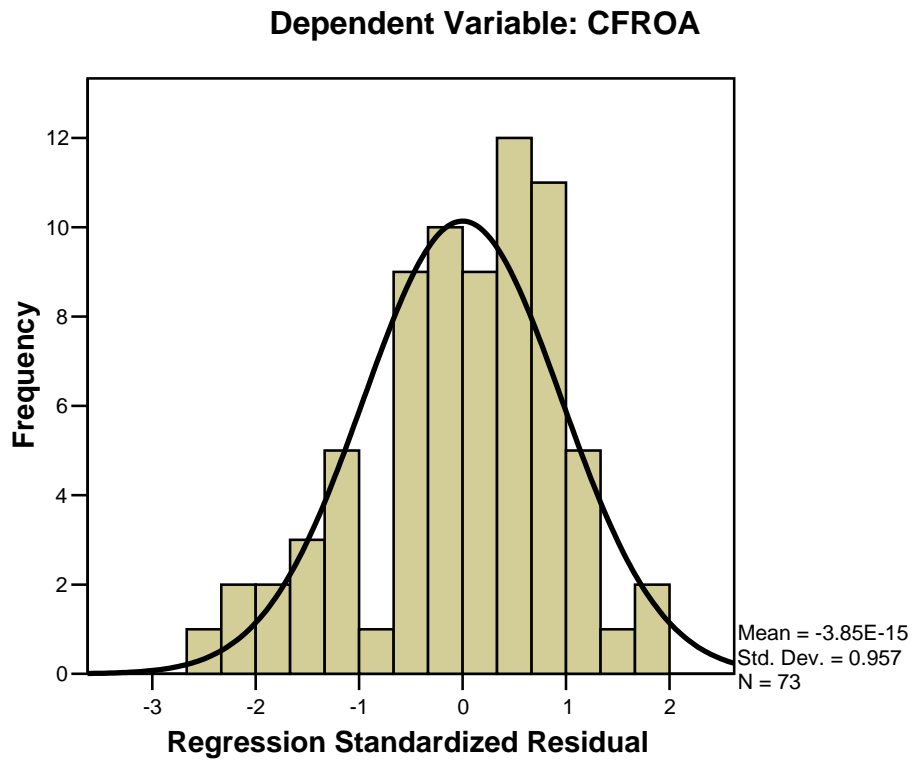
4.2. Uji Kualitas Data

4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, ada dua cara untuk mendeteksinya, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik merupakan cara yang termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.

Dari gambar 4.1. terlihat bahwa pola distribusi mendekati normal, akan tetapi jika kesimpulan normal tidaknya data hanya dilihat dari grafik histogram, maka hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode lain yang digunakan dalam analisis grafik adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang akan menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Gambar 4.1.
Grafik Histogram
Histogram

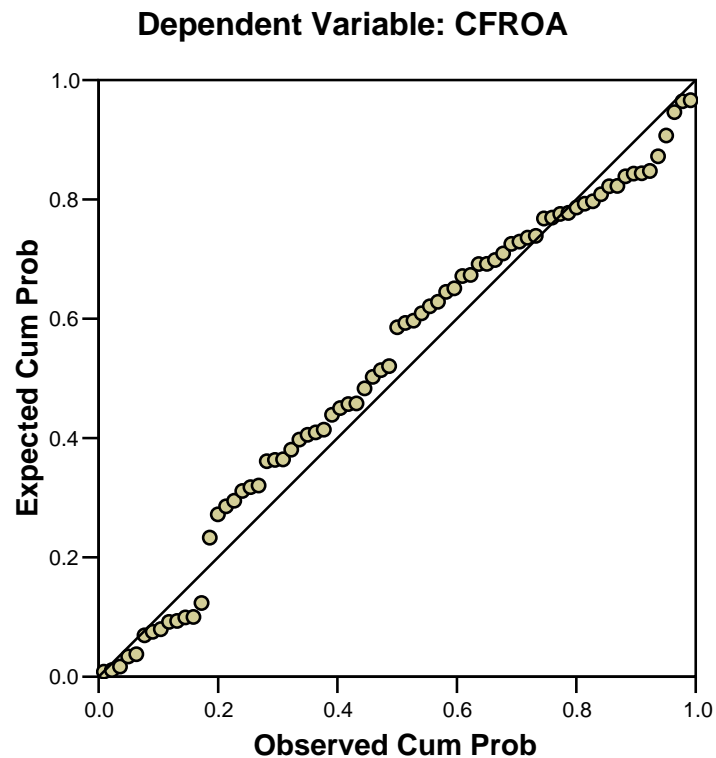


Sumber: Data sekunder yang diolah, 2008

Gambar 4.2.

Normal Probability Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2008

Grafik probabilitas pada gambar 4.2. diatas sekilas memang terlihat normal karena distribusi data residualnya terlihat mendekati garis normalnya. Namun biasanya hal ini menyesatkan, oleh karena itu analisis statistik digunakan untuk memastikan apakah data tersebut benar-benar normal. Pengujian normalitas data secara analisis statistik dilakukan dengan menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov*. Secara multivariat pengujian normalitas data dilakukan terhadap nilai residualnya.

Data yang berdistribusi normal ditunjukkan dengan nilai *asymptotic significance* diatas 0,05 (Ghozali, 2007). Hasil pengujian normalitas data terlihat dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2.

Hasil Pengujian Normalitas dengan Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		73
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,45621095
Most Extreme Differences	Absolute	,096
	Positive	,074
	Negative	-,096
Kolmogorov-Smirnov Z		,822
Asymp. Sig. (2-tailed)		,508

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2008

Berdasarkan Tabel pengujian normalitas, tampak bahwa variabel penelitian DTAC, ukuran dewan direksi dan kepemilikan institusional mengikuti distribusi normal dengan nilai *asymptonic significance* yang lebih dari 5 persen.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini menggunakan

persamaan regresi $\ln \text{CFROA} = f(\text{INST_OWN}, \text{RAPAT}, \text{DIR}, \text{INDEP}, \text{AUD}, \text{LEV})$.

Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF yang terdapat pada masing-masing variabel seperti terlihat pada Tabel 4.3. berikut:

Tabel 4.3.

Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
INST_OWN	,842	1,188
KOMIS	,814	1,228
DIR	,595	1,679
K_INDEP	,537	1,861
K_AUD	,668	1,496
LEV	,789	1,267

a. Dependent Variable: CFROA

Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinieritas adalah jika mempunyai nilai *Tolerance* dibawah 1 dan nilai VIF dibawah 10. Dari tabel tersebut diperoleh bahwa semua variabel bebas memiliki nilai *Tolerance* berada dibawah 1 dan nilai VIF jauh di bawah angka 10. Dengan demikian dalam model ini tidak ada masalah multikolinieritas. Kesimpulan ini didukung dengan hasil koefisien korelasi antar variabel seperti pada tabel 4.4. dibawah ini:

Tabel 4.4.

Hasil Besaran Korelasi antar Variabel

Coefficient Correlations^a

Model		LEV	K_INDEP	KOMIS	INST_OWN	K_AUD	DIR	
1	Correlations	LEV	1,000	-,253	-,267	,004	,180	,395
		K_INDEP	-,253	1,000	,044	-,067	-,521	-,454
		KOMIS	-,267	,044	1,000	,234	-,206	-,274
		INST_OWN	,004	-,067	,234	1,000	-,060	-,254
		K_AUD	,180	-,521	-,206	-,060	1,000	,177
		DIR	,395	-,454	-,274	-,254	,177	1,000
	Covariances	LEV	,638	-,007	-,001	,000	,006	,006
		K_INDEP	-,007	,001	,000	,000	-,001	,000
		KOMIS	-,001	,000	,000	,000	,000	,000
		INST_OWN	,000	,000	,000	,007	,000	,000
		K_AUD	,006	-,001	,000	,000	,002	,000
		DIR	,006	,000	,000	,000	,000	,000

^a Dependent Variable: ABRES

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2008

Melihat besaran (koefisien) korelasi antar variabel diatas, tampak korelasi masih dibawah 95%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas yang serius.

4.2.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).

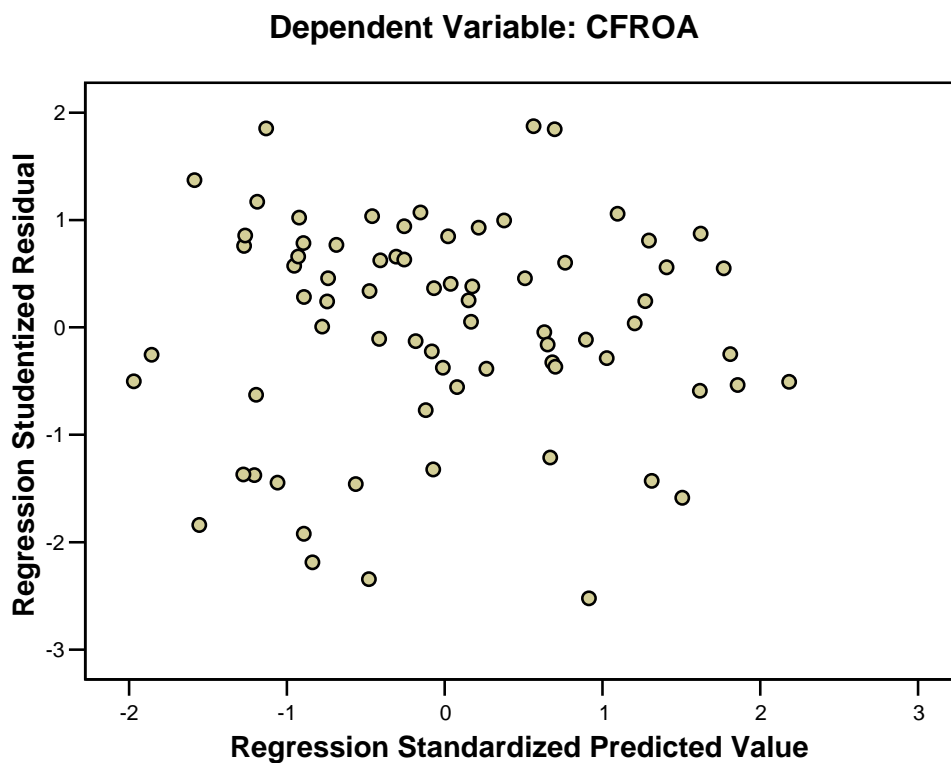
Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatterplot, titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, tersebar baik diatas maupun

dibawah angka 0 pada sumbu Y, bila kondisi ini terpenuhi maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot di tunjukan pada gambar 4.3. berikut ini:

Gambar 4.3.

Grafik Scatterplot

Scatterplot



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2008

Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Akan tetapi

analisis dengan grafik plot memiliki kelemahan dalam keakuratan menginterpretasikannya, oleh sebab itu perlu dilakukan uji statistik untuk lebih menjamin keakuratan hasil.

Uji Glejser test adalah salah satu uji statistik digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Glejser menyarankan untuk meregresi nilai absolut dari e_i terhadap variabel X (variabel bebas) yang diperkirakan mempunyai hubungan yang erat dengan δ_i^2 dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$[e_i] = \beta_1 X_i + v_i$$

dimana: $[e_i]$ merupakan penyimpangan residual; dan

X_i merupakan variabel bebas.

Berdasar output SPSS maka hasil uji heteroskedastisitas dapat ditunjukkan dalam tabel 4.6. sebagai berikut:

Tabel 4.5.

Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Uji Glejser

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,550	,168		3,282	,002
	INST_OWN	,071	,085	,109	,842	,403
	KOMIS	-,004	,003	-,165	-1,249	,216
	DIR	-,011	,019	-,091	-,592	,556
	K_INDEP	,030	,037	,132	,813	,419
	K_AUD	-,012	,044	-,038	-,264	,793
	LEV	,687	,799	,115	,859	,393

a. Dependent Variable: ABRES

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2008

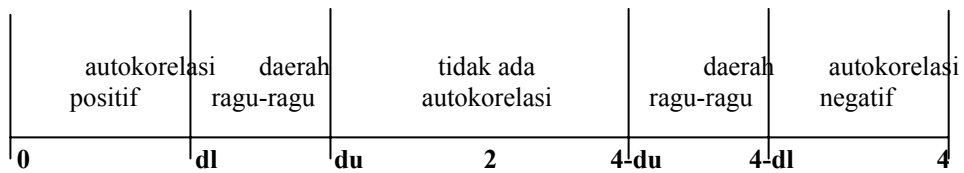
Berdasar hasil yang ditunjukkan dalam tabel 4.5. tersebut nampak bahwa semua variabel bebas menunjukkan hasil yang tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas dalam varian kesalahan.

4.2.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Menurut Ghozali, (2005), model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat nilai uji D-W dengan ketentuan sbb:

Gambar 4.4.

Statistik d Durbin-Watson



Sumber: Gujarati (1995).

- $d < d_L$: terdapat gejala autokorelasi positif
- $d > (4 - d_L)$: terdapat gejala autokorelasi negatif
- $d_L < d < (4 - d_U)$: tidak terdapat gejala autokorelasi
- $d_L < d < d_U$: pengujian tidak meyakinkan

Tabel 4.6.

Uji Durbin-Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,710 ^a	,504	,459	,47650	1,774

a. Predictors: (Constant), LEV, INDEP, RAPAT, INST_OWN, AUD, DIR

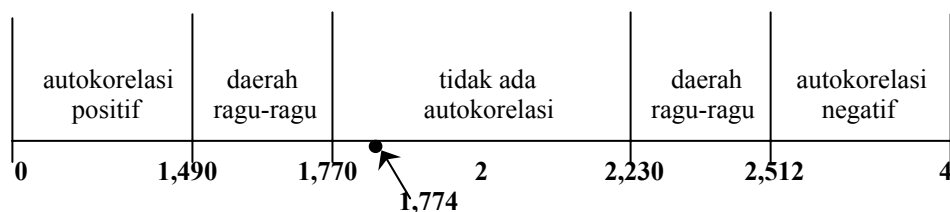
b. Dependent Variable: CFROA

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2008

Berdasar hasil analisis regresi diperoleh nilai hitung Durbin Watson sebesar 1,774; Sedangkan besarnya DW-tabel: dl (batas luar) = 1,490; du (batas dalam) = 1,770; $4 - du = 2,230$; dan $4 - dl = 2,510$; maka dari perhitungan disimpulkan bahwa DW-test terletak pada daerah uji. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.5. sebagai berikut:

Gambar 4.5.

Hasil Uji Durbin-Watson



Sumber: Data sekunder yang diolah.

Sesuai dengan gambar 4.5. tersebut menunjukkan bahwa Durbin-Watson berada di daerah *tidak ada autokorelasi*. Mengacu pada Ghazali (2005), model regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi karena nilai Durbin-

Watsonnya berada diantara Du dan 4-Du. Dengan demikian, model ini layak untuk digunakan untuk memprediksi CFROA berdasar masukan kepemilikan institutional, aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komisaris independen, ukuran komite audit dan *leverage*.

4.3. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menguji hipotesis-hipotesis dengan metode analisis regresi berganda (*multiple regression*). Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan hipotesis dalam penelitian ini, metode regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal. Analisis ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh kepemilikan institutional, aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komisaris independen, ukuran komite audit dan *leverage* yang merupakan variabel independen terhadap *CFROA* yang merupakan variabel dependen.

4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menjelaskan proporsi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas secara bersamaan. Nilai koefisien determinasi berkisar antara $0 \leq R^2 \leq 1$. Bila nilai R^2 semakin mendekati satu maka variabel bebas yang ada semakin besar dalam menjelaskan variabel terikat, tetapi bila nilai R^2 mendekati nol maka variabel bebas semakin kecil dalam menjelaskan variabel terikat.

Tabel 4.7.

Hasil pengujian Koefesien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,710 ^a	,504	,459	,47650

a. Predictors: (Constant), LEV, INDEP, RAPAT, INST_ OWN, AUD, DIR

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2008

Mengacu pada Insukrindo (1998) dalam Ghozali (2005) penggunaan nilai *adjusted R²* dianjurkan pada saat mengevaluasi model regresi, hal ini dikarenakan *adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai *adjusted R²* sebesar 0,459, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen bisa menjelaskan sebesar 45,9 persen terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 54,1 persen dijelaskan oleh faktor lain diluar model persamaan regresi. Sedangkan *Standar Error of Estimate* (SEE) sebesar 0,47650. Makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

4.3.2 Hasil Uji Pengaruh Simultan (F test)

Uji pengaruh simultan (Uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Hasil pengujian pengaruh simultan dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8.

Uji simultan antara variabel independen dengan variabel dependen

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15,242	6	2,540	11,188	,000 ^a
	Residual	14,985	66	,227		
	Total	30,227	72			

a. Predictors: (Constant), LEV, INDEP, RAPAT, INST_OWN, AUD, DIR

b. Dependent Variable: CFROA

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2008

Dari hasil pengujian hipotesis (lihat lampiran) terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 11,188 dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena probabilitas (0,001) lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi bahwa terdapat hubungan signifikan antara variabel dependen (CFROA) dengan semua variabel independen (INST_OWN, KOMIS, DIR, K_INDEP, K_AUDIT, LEV) secara bersama-sama.

4.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (t test)

Keandalan model regresi sebagai alat estimasi sangat ditentukan oleh signifikansi parameter-parameter dalam model yaitu koefisien regresi. Uji signifikansi dilakukan dengan statistik t (uji t). Uji t digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya (Ghozali, 2005). Hasil perhitungan parameter individual t statistik dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9.

Hasil Perhitungan Pengujian Parameter Individual

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6,046	,290		-20,849	,000
	INST_OWN	-,306	,146	-,197	-2,090	,041
	KOMIS	,014	,006	,240	2,495	,015
	DIR	,078	,034	,262	2,336	,023
	K_INDEP	-,049	,063	-,091	-,773	,443
	K_AUD	,200	,075	,281	2,650	,010
	LEV	-6,776	1,382	-,478	-4,905	,000

a. Dependent Variable: CFROA

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2008

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja (CFROA) dipengaruhi oleh kepemilikan institutional, aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komisaris independen, ukuran komite audit dan *leverage* dengan persamaan matematis sebagai berikut :

$$Y = -6,046 - 0,306 X_1 + 0,014 X_2 + 0,078 X_3 - 0,049 X_4 + 0,200 X_5 - 6,776 X_6 + \varepsilon$$

Dari persamaan di atas dapat diartikan:

- a. Nilai konstanta sebesar -6,046

Hal ini berarti bahwa tanpa adanya pengaruh kepemilikan institutional, aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komisaris independen, ukuran komite audit dan *leverage* maka akan terjadi penurunan CFROA hingga mencapai nilai sebesar -6,046, atau dengan kata lain jika variabel independen dianggap konstan, maka kinerja sebesar -6,046.

- b. Koefisien regresi variabel kepemilikan institutional (INST_OWN) X_1

Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan proporsi kepemilikan institutional dengan asumsi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*), maka CFROA akan mengalami perubahan dengan arah yang berbeda.

- c. Koefisien regresi variabel aktivitas komisaris (KOMIS) X_2

Hal ini berarti bahwa setiap perubahan aktivitas komisaris dengan asumsi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*), maka CFROA akan mengalami perubahan dengan arah yang sama.

- d. Koefisien regresi variabel ukuran dewan direksi (DIR) X_3

Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan proporsi ukuran dewan direksi dengan asumsi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*), maka CFROA akan mengalami perubahan dengan arah yang sama.

- e. Koefisien regresi variabel komisaris independen (K_INDEP) X_4

Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan proporsi komisaris independen dengan asumsi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*), maka CFROA akan mengalami perubahan dengan arah yang berbeda.

- f. Koefisien regresi variabel ukuran komite audit (K_AUD) X_5

Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan proporsi ukuran komite audit dengan asumsi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*), maka CFROA akan mengalami perubahan dengan arah yang sama.

- g. Koefisien regresi variabel *leverage* (LEV) X_6

Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan proporsi *leverage* dengan asumsi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*), maka CFROA akan mengalami perubahan dengan arah yang berbeda.

Adapun penjelasan terhadap masing-masing variabel sebagai berikut :

a. Kepemilikan Institusional (INST_OWN)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional (INST_OWN) secara parsial terhadap kinerja. Koefisien regresi kepemilikan institusional sebesar -0,306. Hal ini menunjukkan t kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja. Probabilitas menunjukkan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,041, artinya bahwa variasi variabel kepemilikan institusional secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Sedangkan arah koefisien dari variabel kepemilikan institusional menunjukkan arah yang negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan kepemilikan institusional (INST_OWN) secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja tidak dapat diterima atau **ditolak**.

b. Dewan Komisaris (KOMIS)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aktivitas dewan komisaris (KOMIS) secara parsial terhadap kinerja. Koefisien regresi aktivitas dewan komisaris sebesar 0,014. Hal ini menunjukkan tingkat aktivitas dewan komisaris mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja. Probabilitas menunjukkan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,015, artinya bahwa variasi variabel aktivitas dewan komisaris secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Sedangkan arah koefisien dari variabel aktivitas dewan komisaris menunjukkan

arah yang positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan aktivitas dewan komisaris secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja tidak dapat ditolak atau **diterima**.

c. Ukuran Direksi (DIR)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi (DIR) secara parsial terhadap kinerja. Koefisien regresi ukuran dewan direksi sebesar 0,078. Hal ini menunjukkan tingkat ukuran dewan direksi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja. Probabilitas menunjukkan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,023, artinya bahwa variasi variabel ukuran dewan direksi secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Sedangkan arah koefisien dari variabel ukuran dewan direksi menunjukkan arah yang positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan ukuran dewan direksi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja tidak dapat ditolak atau **diterima**.

d. Komisaris Independen (K_INDEP)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komisaris independen (K_INDEP) secara parsial terhadap kinerja. Koefisien komisaris independen sebesar 0,049. Hal ini menunjukkan komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja. Probabilitas menunjukkan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,443, artinya bahwa variasi variabel komisaris independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Sedangkan arah koefisien dari variabel menunjukkan arah yang negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan komisaris independen

(K_INDEP) secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja tidak dapat diterima atau **ditolak**.

e. Komite Audit (K_AUDIT)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit (K_AUDIT) secara parsial terhadap kinerja. Koefisien regresi ukuran komite audit sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan tingkat ukuran komite audit mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja. Probabilitas menunjukkan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,010, artinya bahwa variasi variabel ukuran komite audit secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Sedangkan arah koefisien dari variabel ukuran komite audit menunjukkan arah yang positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima yang menyatakan ukuran komite audit secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja tidak dapat ditolak atau **diterima**.

f. Leverage (LEV)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *leverage* (LEV) secara parsial terhadap kinerja. Koefisien regresi *leverage* sebesar -6,776. Hal ini menunjukkan *leverage* mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja. Probabilitas menunjukkan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000, artinya bahwa variasi variabel *leverage* secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Sedangkan arah koefisien dari variabel *leverage* menunjukkan arah yang negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam yang menyatakan *leverage* secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kinerja tidak dapat ditolak atau **diterima**.

4.4. Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif terhadap kinerja keuangan pada tingkat signifikan 5%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan tidak dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Jensen dan Meckling (1976), Warfield *et al.*, (1995), Dhaliwal *et al.*, (1982), Morck *et al.*, (1988) dan Midiastuti dan Mas'ud (2003) yang menemukan adanya pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

Temuan ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang mampu mempengaruhi kinerja keuangan. Jika dilihat dari pola hubungannya, maka pengaruhnya adalah negatif. Artinya, semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh institusi, maka semakin rendah kinerja pada laporan keuangan. Berdasarkan *review* penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa hasil penelitian ini tidak mendukung atau bertentangan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Porter (1992), Bushee (1998), Rajgopal dan Venkatachalam (1998), Rajgopal *et al.* (1999), Midiastuty dan Mas'ud Mahfoedz (2003) yang mengatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja.

Hal ini sejalan dengan pandangan atau konsep yang mengatakan bahwa kepemilikan institusional adalah pemilik sementara dan lebih memfokuskan pada laba jangka pendek (*current earnings*), sebagaimana dikemukakan oleh Porter (1992). Jika perubahan laba jangka pendek (*current earnings*) ini tidak dirasakan

menguntungkan oleh investor, maka mereka akan melikuidasi sahamnya. Oleh karena investor institusional memiliki saham dalam jumlah yang besar, jika mereka melikuidasi sahamnya akan mempengaruhi nilai saham secara keseluruhan. Atas dasar perspektif inilah, **diduga** dalam rangka menghindari likudasi dari investor, manajer akan melakukan tindakan manajemen laba yang pada akhirnya juga dapat menurunkan kinerja mereka.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Cornett *et al.*, (2006) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional akan membuat manajer merasa terikat untuk memenuhi target laba dari para investor, sehingga **diduga** mereka akan tetap cenderung terlibat dalam tindakan manipulasi laba. Prosentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005). Kepemilikan saham yang terpusat dalam satu kelompok atau satu keluarga, dapat menjadi salah satu penyebab lemahnya posisi Dewan Komisaris, karena pengangkatan posisi anggota Dewan Komisaris diberikan sebagai rasa penghargaan semata maupun berdasarkan hubungan keluarga atau kenalan dekat (Herwidayatmo, 2000).

Selain itu, emiten yang dianalisis termasuk memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi pada suatu institusi yang biasanya memiliki saham yang cukup besar yang **diduga** mencerminkan kekuasaan, sehingga mempunyai kemampuan untuk melakukan intervensi terhadap jalannya perusahaan dan mengatur proses penyusunan laporan keuangan. Akibatnya diduga manajer terpaksa melakukan tindakan berupa manajemen laba demi untuk memenuhi keinginan pihak-pihak

tertentu, diantaranya pemilik. Dengan adanya perilaku disfungsional ini, dimana manajemen melakukan tindakan berupa manajemen laba, akan berakibat pada penurunan kinerja

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris berpengaruh secara positif terhadap kinerja pada tingkat signifikan 5%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh secara positif signifikan terhadap manajemen laba diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dechow *et al.*, (1996), Klein (2002), Chtourou *et al.*, (2001), Xie *et al.*, (2003), Pranata dan Mas'ud (2003) dan Cornett *et al.*, (2006), Darmawati (2003).

Sesuai dengan fungsinya, peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan dapat meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham, yaitu dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tindakan kecurangan dalam bentuk tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan tersebut. Fungsi monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris (Vafeas, 2000).

Hubungan antara anggota dewan komisaris dengan kinerja serta nilai perusahaan didukung oleh perspektif fungsi *service* dan kontrol yang dapat diberikan oleh dewan komisaris. Fungsi *service* menyatakan bahwa dewan komisaris dapat memberikan konsultasi dan nasehat kepada manajemen dan direksi. Dengan menekankan pada fungsi aktivitas dewan komisaris tersebut, peranan keahlian atau

konseling yang diberikan oleh dewan komisaris merupakan suatu jasa yang berkualitas bagi manajemen dan perusahaan yang tidak dapat diberikan oleh pasar (Dalton dan Daily, 1999). Anggota dewan komisaris yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu juga dapat memberikan nasehat yang bernilai dalam penyusunan strategi dan penyelenggaraan perusahaan (Fama dan Jensen, 1983), dalam rangka mewujudkan kinerja yang prima dalam manajemen perusahaan.

Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan (komisaris) diambil dari teori agensi. Dari perspektif teori agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer (Jensen, 1993 dalam Young *et al.*, 2001). Dewan komisaris secara signifikan berpengaruh dalam menghalangi tindak manajemen untuk melakukan sikap oportunis yang tinggi. Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) juga menyatakan hal yang sama yaitu makin banyak dewan komisaris maka pembatasan atas tindakan kecurangan dapat dilakukan lebih efektif, sehingga kinerja akan meningkat.

Sesuai dengan teori agensi, fungsi dewan komisaris sesuai dengan peranannya akan mereduksi terjadinya *agency cost* yang tinggi. Dengan adanya peningkatan pengawasan dan transparansi akan berdampak pada penurunan *information asymmetry*, dan implikasinya *monitoring cost* pun juga akan mengalami penurunan, sehingga efisiensi perusahaan juga dapat terwujud. Hal ini didasarkan pada logika ketika manajemen (agen) diawasi secara ketat oleh komisaris, mereka akan berupaya untuk menunjukkan kepada komisaris (*principal*) bahwa mereka tidak akan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan, dan manajer akan berbuat demi

kebaikan perusahaan. Kesadaran akan hal ini memunculkan upaya (*efforts*) dari manajemen agar mereka dipercaya oleh *principal*. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menunjukkan itikad baik dan memberikan mewujudkan kinerja yang prima serta komprehensif kepada *principal*.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan direksi berpengaruh secara positif terhadap variabel *CFROA* pada tingkat signifikan 5%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja diterima. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Yermack (1996), Beasley (1996) Jensen (1993), Alexander, Fernell, Halporn, (1993), Goodstein, Gautarn, Boeker, (1994), Mintzberg (1983), Bennedsen (2002), Klein (1998), Mak dan Li (2000), Suranta dan Mahfoedz (2003), Darmawati (2003).

Pfeffer & Salancik (1978) menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi. Selain itu ujung tombak dari efektivitas serta efisiensi perusahaan bergantung pada mekanisme pengelolaan manajemen perusahaan yang menjadi tugas dari direksi. Baik atau buruknya kinerja akan bergantung pada kemampuan dewan direksi sebagai *resource* perusahaan secara lebih baik. Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resources dependence* (Alexander, Fernell, Halporn, 1993; Goodstein, Gautarn, Boeker, 1994; Mintzberg, 1983). Sesuai dengan sudut pandang *resources dependence* adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewan direksi untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik (Dalton et al, 1999). Hasil ini

memberikan suatu gambaran bahwa dalam mengurangi konflik kepentingan, ukuran dan jumlah dewan direksi mampu mengurangi permasalahan dalam teori keagenan serta mampu membatasi *controlling owner* untuk mengeksploitasi kepentingan *non-controlling owner* (Suranta dan Mahfoedz, 2003). Bennedsen (2002) juga berargumen bahwa suatu perusahaan akan mempunyai dua motif utama untuk memiliki dewan direksi, yaitu motif *governance* (penciptaan nilai perusahaan) dan motif distribusi (membatasi kepentingan *controlling owner*).

Hasil pengujian hipotesis keempat menyimpulkan bahwa komisaris independen secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Dengan demikian, hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lorsch (1989), Mizruchi (1983), Zahra & Pearce (1989), Baysinger, Kosnik & Turk (1991) Goodstein & Boeker (1991), Kusumawati dan Riyanto (2005). Sylvia dan Sidharta (2005) juga menyatakan bahwa pengangkatan dewan komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam perusahaan. Kondisi ini juga ditegaskan dari hasil survai *Asian Development Bank* dalam Boediono Gideon (2005) yang menyatakan bahwa kuatnya kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris tidak independen. Fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggungjawab anggota dewan menjadi tidak efektif. Keberadaan komisaris independen ini tidak dapat meningkatkan efektifitas monitoring yang dijalankan oleh komisaris.

Menurut Kusumawati dan Riyanto (2005) keberadaan komisaris independen dalam perusahaan cenderung tampak sekedar formalitas untuk memenuhi peraturan

yang ada karena 50 persen sampel mempunyai persentase independensi minimal, yaitu sebesar 33%, bahkan terdapat proporsi komisaris independen yang kurang dari persyaratan minimal 30 persen, serta terdapat beberapa bank yang tidak memiliki komisaris independen. Padahal menurut aturan Bapepam, proporsi komisaris independen terhadap total komisaris adalah sebesar 30 persen, dan menurut aturan PBI No. 14 tahun 2006 menyatakan bahwa dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen, di mana setidaknya 50 persen dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen.

Selain itu, komisaris utama yang cenderung dapat mengatur keefektifan seluruh tugas dan fungsi dewan komisaris masih merupakan komisaris yang tidak independen. Dari beberapa komisaris independen yang ada pun, tidak semua komisaris independen memiliki waktu dalam rangka memberikan fokus pengawasan terhadap kinerja manajerial. Hal ini terlihat dari proporsi kehadiran rapat komisaris, dimana komisaris independen tidak secara keseluruhan menghadiri rapat dewan komisaris. Aktifnya peranan Dewan Komisaris dalam praktek memang sangat tergantung pada lingkungan yang diciptakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Dalam beberapa kasus memang ada baiknya Dewan Komisaris memainkan peranan yang relatif pasif, namun di Indonesia sering terjadi anggota Komisaris Independen bahkan sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat mendasar terhadap Dewan Direksi. Komisaris independen seringkali dianggap tidak memiliki manfaat. Hal ini dapat dilihat dalam fakta, bahwa banyak anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kemampuan, dan tidak dapat menunjukkan independensinya (sehingga dalam banyak kasus, Dewan Komisaris juga gagal untuk mewakili

kepentingan *stakeholders* lainnya selain daripada kepentingan pemegang saham mayoritas).

Berdasar data yang ada, sebagian besar komisaris independen terdiri dari pejabat publik ataupun tokoh masyarakat, yang belum tentu memiliki keahlian dalam konteks manajemen perusahaan. Sebagian besar anggota komisaris ternyata juga menjabat sebagai komisaris dan direksi di perusahaan lain (*cross-directorships*), baik perusahaan yang berkaitan maupun perusahaan lain. Mantan pejabat pemerintahan ataupun yang masih aktif, biasanya diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris suatu perusahaan dengan tujuan agar mempunyai akses ke instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam hal ini integritas dan kemampuan Dewan Komisaris seringkali menjadi kurang penting. Pada gilirannya independensi Dewan Komisaris menjadi sangat diragukan karena hubungan khususnya dengan pemegang saham mayoritas ataupun hubungannya dengan Dewan Direksi ditambah kurangnya integritas serta kemampuan Dewan Komisaris. (Herwidayatmo, 2000).

Persoalan independensi juga muncul dalam hal penggajian Dewan Komisaris didasarkan pada prosentase gaji Dewan Direksi. Kepemilikan saham yang terpusat dalam satu kelompok atau satu keluarga, dapat menjadi salah satu penyebab lemahnya posisi Komisaris Independen, karena pengangkatan posisi anggota Komisaris Independen diberikan sebagai rasa penghargaan semata maupun berdasarkan hubungan keluarga atau kenalan dekat.

Berdasarkan fenomena tersebut, diduga menyebabkan komisaris independen tidak dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja. Secara teoritis, dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau *outside director* dapat

mengurangi tindakan oportunistis manajemen, sehingga jika anggota dewan komisaris dari luar meningkatkan tindakan pengawasan akan berhubungan dengan makin rendahnya perilaku menyimpang yang dilakukan manajemen, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja (Cornett et al., 2006).

Hasil pengujian hipotesis kelima menyimpulkan bahwa keberadaan komite audit secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Nuryanah (2004), namun sesuai dengan hasil penelitian Felo (2003) dan Effendi (2005), Xie, Davidson, Dadalt (2003), Veronica dan Bachtiar (2004), Wedari (2004), dan Wilopo (2004). Sehingga terbukti bahwa adanya komite audit yang efektif dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena dapat menekan terjadinya penyimpangan-penyimpangan akuntansi yang sering dilakukan oleh banyak perusahaan di Indonesia.

Perusahaan perbankan di Indonesia yang telah membentuk komite audit sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai pembentukan komite (Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 dan No. Peng-4247/BEJ-PEM 09-2002) terbukti dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena adanya peningkatan kepercayaan investor terhadap akuntabilitas perusahaan tersebut. Dengan kata lain, investor mulai memperhatikan kepatuhan perusahaan dalam penerapan GCG, khususnya keberadaan komite audit dalam proses pengambilan keputusan sehubungan dengan investasinya pada perusahaan tersebut.

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) sehingga dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang

melakukan kecurangan dalam bentuk *earnings management* dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal.

Klein (2002) memberikan bukti secara empiris bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen melaporkan laba dengan kandungan akrual diskresioner yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit independen. Kandungan *discretionary accruals* tersebut berkaitan dengan kualitas laba perusahaan. Price Waterhouse (1980) dalam McMullen (1996) menyatakan bahwa investor, analis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan. Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui: (1) pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum, dan (2) mengawasi proses audit secara keseluruhan. Hasilnya mengindikasikan bahwa adanya komite audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan yaitu: (1) berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat, (2) berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat dan (3) berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal.

Lebih jauh, Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) juga menguji efektifitas komite audit dalam mengurangi perilaku disfungsi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Komite audit yang berasal dari luar mampu melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hal ini berarti komite audit yang ada di perusahaan sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* mampu mengurangi tindak manipulasi laba oleh manajemen. Dari sini dapat terlihat bahwa komite audit yang ada di perusahaan perbankan telah

menjalankan tugas dengan semestinya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan dengan menjunjung prinsip *corporate governance*, transparansi, *fairness*, tanggung jawab, dan akuntabilitas (NCCG, 2006) yang pada prosesnya dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka *control* terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga, konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi.

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Bradbury et al. 2004). Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Di dalam pelaksanaan tugasnya komite menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal dan auditor internal (Bradbury et al. 2004). Adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal akan menjamin proses audit internal dan eksternal dilakukan dengan baik. Proses audit internal dan eksternal yang baik akan meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan (Anderson et al. 2003).

Sesuai dengan hipotesis ini, komite audit dapat diterima dalam ekonomi pasar karena menawarkan peran dalam meredam dan menyelesaikan konflik atau kepentingan yang saling tabrakan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam terbentuknya organisasi bisnis. Tanggungjawab Komite Audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup komite audit harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern.

Disamping itu, definisi baru tentang audit intern memperkuat tanggung jawab Komite Audit dalam hal *Corporate Control* karena dalam definisi tersebut dinyatakan, bahwa audit intern merupakan kegiatan yang mandiri dalam memberikan kepastian (*assurance*), serta konsultasi untuk memberikan nilai tambah untuk memperbaiki kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan secara sistematis dan disiplin dalam menilai dan memperbaiki efektifitas manajemen risiko, pengawasan dan proses *Governance*. (*The Institute of Internal Auditors, Internal Auditing and The Audit Committee*).

Peran Komite Audit adalah untuk mengawasi dan memberi masukan kepada Dewan Komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan. Mengingat bahwa akhir-akhir ini *Corporate Governance* merupakan salah satu topik pembahasan sehubungan dengan semakin gencarnya publikasi tentang kecurangan (*fraud*) maupun keterpurukan bisnis yang terjadi sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh para eksekutif manajemen, maka hal ini menimbulkan suatu tanda tanya tentang

kecukupan (*adequacy*) *Corporate Governance*. Demikian pula halnya tentang kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dipertanyakan. Oleh karena itu adalah suatu hal yang wajar dan penting bagi semua pihak yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan untuk mengupayakan mengurangi bahkan menghilangkan krisis kepercayaan (*credibility gap*) dengan mengkaji kembali peranan masing-masing dalam proses penyusunan tersebut. Dalam hal ini Komite Audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance*. (*Improving Audit Committee Performance: What Works Best - A Research Report prepared by Pricewaterhouse Coopers, the Institute of Internal Auditors Research Foundation*).

Hasil pengujian hipotesis keenam menyimpulkan bahwa *leverage* secara signifikan negatif berpengaruh terhadap kinerja. Semakin besar *leverage* dapat mencegah tindakan *opportunistik* manajer. Dengan demikian, hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Black dkk. (2003) dan Gillan dkk. (2003) berhasil menemukan adanya hubungan negatif antara *leverage* dan kualitas *corporate governance*, serta menolak hasil penelitian Durnev dan Kim (2003) yang menemukan adanya hubungan positif antara pemilihan perusahaan akan praktik *governance* dan pengungkapan berhubungan secara positif dengan kebutuhan perusahaan akan pendanaan eksternal. Sementara penelitian Baruci dan Falini (2004) tidak berhasil menemukan adanya hubungan antara *leverage* dan kualitas *corporate governance*.

Bagi sektor perbankan yang sebagian besar operasi usahanya ditopang oleh utang dari penyimpan (antara lain: tabungan, deposito masyarakat), manfaat tersebut perlu mendapat telaah lebih lanjut. Justru sebaliknya, utang bagi bank dapat menimbulkan masalah keagenan yang cukup serius. Hal ini disebabkan oleh keputusan-keputusan keuangan akan diambil oleh pemilik (lewat pihak manajemen yang diangkat oleh pemilik) sedemikian rupa sehingga apabila keputusan tersebut ternyata bekerja dengan baik, maka manfaatnya akan dinikmati oleh seluruh pemilik perusahaan, tetapi bila gagal, pemberi kredit (dalam industri perbankan, para penyimpan) diminta untuk ikut menanggung kerugian tersebut (Husnan, 2001).

Terlebih lagi, dengan adanya penjaminan simpanan, para penyimpan cenderung bersikap pasif dalam melakukan pengendalian untuk mencegah setiap usaha peningkatan risiko yang dilakukan oleh pemegang saham (Merton, 1977). Hal ini semakin mendorong pemegang saham bank untuk meningkatkan risiko usaha dengan melakukan penggeseran risiko (*risk shifting*). Fungsi pengendalian sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjamin simpanan (*deposit insurer*). Mengingat penjamin simpanan belum tentu dapat melakukan pengendalian sepenuhnya maka setiap kerugian bank yang timbul pada akhirnya ditanggung oleh para pembayar pajak, dalam hal ini masyarakat. (Kane, 1986, 1987).

Pendapat lain mengatakan bahwa semakin tinggi *leverage*, kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba di masa depan. Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. Manajer akan memilih metode

akuntansi yang akan memaksimalkan laba sekarang. Kontrak utang biasanya berisi tentang ketentuan bahwa perusahaan harus menjaga tingkat *leverage* tertentu, *interest coverage*, modal kerja dan ekuitas pemegang saham (Watt & Zimmerman (1990) dalam Scott (1997)). Oleh karena itu semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi (Belkaoui dan Karpik, 1989). Supaya laba yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial). Implikasinya adalah adanya kecenderungan manajemen melakukan *discretionary* pada laporan keuangan, yang akhirnya akan menurunkan kinerja perusahaan.

Perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* tinggi akibat besarnya jumlah utang dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki perusahaan, diduga melakukan *earnings management* karena perusahaan terancam *default* yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya. Perusahaan akan berusaha menghindarinya dengan membuat kebijaksanaan yang dapat meningkatkan pendapatan maupun laba. Dengan demikian akan memberikan posisi *bargaining* yang relatif lebih baik dalam negosiasi atau penjadwalan ulang utang perusahaan (Jiambalvo 1996). Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi termotivasi untuk melakukan manajemen laba agar terhindar dari pelanggaran perjanjian utang.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI HASIL PENELITIAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini berusaha untuk menguji pengaruh *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komisaris independen, komite audit, dan leverage terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia keuangan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komisaris independen, komite audit dan rasio leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Akan tetapi variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja. Adapun hasil penelitian secara ringkas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional (INST_OWN) mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja. Probabilitas menunjukkan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,041, artinya bahwa variasi variabel kepemilikan institusional secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Sedangkan arah koefisien dari variabel kepemilikan institusional menunjukkan arah yang negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan kepemilikan institusional (INST_OWN) secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja tidak dapat diterima atau **ditolak**.
2. Aktifitas dewan komisaris (KOMIS) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja. Probabilitas menunjukkan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar

0,015, artinya bahwa variasi variabel aktivitas dewan komisaris secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Sedangkan arah koefisien dari variabel aktivitas dewan komisaris menunjukkan arah yang positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan aktivitas dewan komisaris secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja tidak dapat ditolak atau **diterima**.

3. Ukuran Dewan Direksi (DIR) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja. Probabilitas menunjukkan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,023, artinya bahwa variasi variabel ukuran dewan direksi secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Sedangkan arah koefisien dari variabel ukuran dewan direksi menunjukkan arah yang positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan ukuran dewan direksi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja tidak dapat ditolak atau **diterima**.
4. Komisaris independen (K_INDEP) mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja. Probabilitas menunjukkan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,443, artinya bahwa variasi variabel komisaris independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Sedangkan arah koefisien dari variabel tingkat suku bunga menunjukkan arah yang negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan komisaris independen (K_INDEP) secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja tidak dapat diterima atau **ditolak**.

5. Ukuran Komite Audit (K_AUD) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja. Probabilitas menunjukkan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,010, artinya bahwa variasi variabel ukuran komite audit secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Sedangkan arah koefisien dari variabel ukuran komite audit menunjukkan arah yang positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima yang menyatakan ukuran komite audit secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja tidak dapat ditolak atau **diterima**.
6. *Leverage* (LEV) mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja. Probabilitas menunjukkan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000, artinya bahwa variasi variabel leverage secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Sedangkan arah koefisien dari variabel leverage menunjukkan arah yang negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam yang menyatakan leverage secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kinerja tidak dapat ditolak atau **diterima**.

5.2. Implikasi Hasil Penelitian

5.2.1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi bagi pihak regulator dalam hal gambaran tentang implementasi *good corporate governance* pada perusahaan perbankan di Indonesia beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi masukan bagi pihak regulator untuk meregulasi implementasi *good corporate governance* pada perusahaan-perusahaan di

Indonesia, khususnya bagi perusahaan perbankan yang dalam penelitian ini ditemukan masih memiliki kualitas implementasi *corporate governance* yang belum baik.

Penelitian ini mendukung dan memberikan bukti bahwa mekanisme *corporate governance* yang meliputi kepemilikan institusional, aktivitas dewan komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit dan rasio leverage secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja. Akan tetapi untuk variabel komisaris independen, hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan (kontradiktif).

5.2.2. Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi, implikasi manajerial dari hasil temuan penelitian ini untuk setiap variabelnya adalah sebagai berikut:

5.2.2.1 Bagi perusahaan.

1. Mekanisme *corporate governance* mampu mengendalikan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan, sehingga dapat menekan terjadinya masalah keagenan (*agency problem*) karena dapat menselaraskan perbedaan kepentingan atau tujuan antara pihak agen dengan prinsipal maupun pihak prinsipal (pemegang saham) dengan prinsipal lainnya (pemberi pinjaman), serta di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Mekanisme yang optimal dalam pengelolaan perusahaan akan menciptakan suatu kondisi perusahaan yang baik, pada akhirnya akan tercapai efisiensi perusahaan.

2. Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* akan memperbaiki citra perbankan, mengingat dalam *GCG* terkandung lima prinsip yang dianggap positif bagi pengelolaan sebuah perusahaan, yaitu prinsip keterbukaan atau transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip tanggung jawab (*responsibility*), prinsip independensi, prinsip kewajaran.
3. Langkah pertama dan utama dalam menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)* adalah adanya dewan komisaris yang berperan aktif, independen, dan konstruktif. Untuk itu, dibutuhkan struktur, sistem, dan proses yang memadai agar hal tersebut dapat terwujud. Setidaknya mencakup komposisi, kemampuan dan pengalaman anggota dewan, serta bagaimana proses seleksi, peran, dan penilaian kinerja mereka.
4. Agar sistematis dan kontinu, pelaksanaan *GCG* oleh perbankan dapat dilakukan melalui empat tindakan, yaitu: penetapan visi, misi, dan *corporate values*, penyusunan *corporate governance structure*, pembangunan *corporate culture*, dan penetapan sasaran *public disclosures*.

5.2.2.2. Bagi investor.

Laba merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang dihasilkan emiten, yang disusun berdasarkan norma atau standar akuntansi keuangan, sehingga tidak dapat dihindarkan adanya tindakan manajemen laba. Para investor sebaiknya berhati-hati dalam pengambilan keputusan bisnis, tidak hanya terfokus pada informasi laba, tetapi juga

mempertimbangkan informasi non keuangan, seperti keberadaan mekanisme internal perusahaan.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Adapun beberapa keterbatasan adalah :

1. Jumlah pengamatan yang digunakan didalam penelitian ini relatif sedikit dan periode yang pendek, yakni terbatas pada bank yang listed di BEI tahun 2004 hingga 2007, hal ini terkait dengan adanya keterbatasan data. Padahal masih banyak perusahaan bank-bank lain yang mungkin dapat dijadikan sebagai objek penelitian. Sehingga hasil penelitian tidak dapat di generalisir pada konteks industri perbankan yang lebih luas di Indonesia.
2. Variabel *corporate governance* yang ada kurang dapat mengukur secara komprehensif realitas dari praktik *corporate governance* dalam perusahaan, sehingga perlu adanya indeks tertentu yang mencerminkan praktik *corporate governance* secara lebih tepat. Selain itu karakteristik komisaris independen dan komite audit secara spesifik tidak disertakan, misalnya kompetensi, keahlian, latar belakang pendidikan, pengalaman komisaris independen dan komite audit.
3. Hasil juga menunjukkan pengaruh variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen, yakni sebesar 45,9 persen dan sisanya sebesar 54,1 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi, seperti faktor ekonomi negara secara makro serta faktor kondisi politik negara.

5.4. Agenda Penelitian Mendatang

Meskipun terdapat berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, namun hasil penelitian mengindikasikan pemahaman yang lebih baik terhadap prediktor atas kinerja dapat diperoleh dengan menginvestigasi pengaruh dari mekanisme *good corporate governance*.

Dengan memperhatikan keterbatasan yang ada, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Jumlah pengamatan yang digunakan dalam penelitian yang akan datang, tidak hanya sebatas pada bank yang listed di BEI dengan menggunakan periode yang lebih panjang, sehingga perusahaan yang menjadi sampel penelitian menjadi lebih banyak dan lebih representatif, mengingat di Indonesia terdapat 130 perusahaan perbankan (Indikator dan Direktori Perbankan Indonesia, 2006). Hal ini dimaksudkan agar hasilnya bisa digeneralisir sebagai prediktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan atas dasar mekanisme *good corporate governance*, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
2. Penelitian yang akan datang dapat mencoba menggunakan perhitungan kinerja keuangan yang lebih kompleks untuk melihat konsistensi hasil penelitian dengan menggunakan harga saham, seperti Tobin's Q atau *Economic Value Added (EVA)*
3. Pada penelitian yang akan datang bisa diperbandingkan antara perbankan yang ada, misalnya antara bank devisa dengan bank non devisa, bank pemerintah dan bank asing, atau membandingkan bank dengan melihat asetnya, dan sebagainya.

4. Variabel *corporate governance* untuk mengukur secara komprehensif realitas dari praktik *corporate governance*, perlu ditambahkan dengan memasukkan antara lain, sistem pengawasan internal (*internal control system*), pengelolaan risiko (*risk management*), dan etika bisnis. Pengawasan internal melalui pemeriksaan dan konsultasi (*assurance* dan *consulting*) dan pengelolaan risiko melalui *risk based auditing* dan *governance processes*. Selain itu karakteristik komisaris independen dan komite audit secara spesifik perlu disertakan, misalnya kompetensi, keahlian, latar belakang pendidikan, pengalaman komisaris independen dan komite audit.
5. Kepemilikan Institusional mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja, sehingga hipotesis yang menyatakan kepemilikan institusional secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja tidak dapat diterima. Sehubungan dengan itu, maka dari itu penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan penelitian lain untuk menemukan bukti empiris mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi investor institusional dalam melakukan investasi pada perusahaan bank, dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan agen melakukan manajemen laba. Apakah kepemilikan institusional mempengaruhi manajemen laba, yang berdampak terhadap penurunan kinerja.

DAFTAR REFERENSI

- Ali Irfan (2002). Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Agensi. *Lintasan Ekonomi Vol. XIX. No.2. Juli 2002*
- Alijoyo, Antonius, Elmar Bouma, TB M Nazmudin Sutawinangun, dan M Doddy Kusadrianto. 2004. *Review of Corporate Governance in Asia: Corporate Governance in Indonesia*. Forum for *Corporate Governance* in Indonesia
- Anderson, K., Deli, D., Gillan, S., 2003, "Boards of Directors, Audit Committees, and the Information Content of Earnings", SSRN Working Paper, september.
- Ariyoto, K. 2000. *Good Corporate Governance dan Konsep Penegakannya di BUMN dan Lingkungan Usahanya*. USAHAWAN No. 10 tahun XXIX Oktober. hal: 3-17.
- Ana, Tince, 2004, *Hubungan Mekanisme Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan: Studi Empirik pada Perusahaan Go Publik di Indonesia*. Skripsi yang tidak dipublikasikan, Sarjana Akuntansi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Bank Indonesia, 2004. Booklet Perbankan Indonesia. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan
- Beasley, Mark S., 1996. An Empirical Analysis of The Relation Between The Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review* Volume 71, No 4, Oktober: 443-465
- Baysinger, B., Kosnik, R. D., & Turk, T. A. 1991. Effects of board and ownership structure on corporate R&D strategy. *Academy of Management Journal*, 34: 205-214
- Beaver, H. William, and Ellen E. Engel. 1996. Discretionary Behavior with Respect to Allowances for Loan Losses and the Behavior of Security Prices. *Journal of Accounting & Economics* Volume 22. Agustus- Desember: 177-206
- Beiner. S., W. Drobetz, F. Schmid dan H. Zimmermann (2003). Is Board zise An Independent Corporate Governance Mechanism ?. <http://www.wvz.unibaz.ch/cofi/publications/papers/2003/06.03.pdf>
- Berghe, L. V., dan Ridder, L. D. 1999. *International Standardization of Good Corporate governance: Best Practices for the Board of Directors*. Boston: Kluwer Academic Publishers.
- Boediono, Gideon SB., 2005. *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis*

Jalur. Artikel yang Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 8 Solo tanggal 15 - 16 September 2005

- Boeker, W., Goodstein, J., Stephan, J., & Murmann, J. P. 1997. Competition in a multi-market environment: The case of market exit. *Organization Science*, 8: 126-142.
- Bowen, R., Rajgopal, S., Venkatachalam, M., 2004, "Accounting Discretion, Corporate Governance and Firm Performance", SSRN Working Paper, March
- Bugshan, Turki, 2005, Corporate Governance, Earning Management and the Information Content of Accounting Earnings, Theoretical Model and Empirical Tests, A Dissertation, Bond University Queensland, Australia
- Bushee, B., 1998, "The Influence of institutional investors on myopic R&D investment behaviour", *The Accounting Review*, Vol. 73, pp. 305-333.
- Black, B. S., H. Jang, dan W. Kim. 2003. Does Corporate governance Affect Firms' Market Values? Evidence from Korea. Working Paper (April).
- Bradbury, M. E., Mak, Y. T. dan Tan, S. M., 2004 "Board Characteristics, Audit Committee Characteristics and Abnormal Accruals", *Working Paper*, Unitec New Zealand dan National University of Singapore,
- Bryshaw, R. E dan Ahmed Eldin.(1989). The Smoothing Hypothesis and The Role of Exchange Differences. *Journal of Business, Finance and Accounting*, hal. 621-633.
- Caprio, Levine., 2002, Corporate Governance of Banks: Concept and International Observations Global Corporate Governance Forum research Network Meeting, Worldbank, IMF. Working Paper.
- Carcello, Joseph V., Carl W. Hollingsworth, April Klein, and Terry L. Neal. 2006. Audit Committee Financial Expertise, Competing Corporate Governance Mechanisms, and Earnings Management. Available on-line at www.ssrn.com
- Chtourous. Marrakachi, Jean Bedard and Louucie Courteau, 2001, Corporate Governanca and earning management, Working paper, <http://papers.ssrn.com>.
- Cornett M. M, J. Marcuss, Saunders dan Tehranian H. (2006). Earnings Management, Corporate Governance, and True Financial Performance. <http://papers.ssrn.com/>
- Daily, C., Dalton, D., 1994 "Board of directors leadership and structure: Control and performance implications", *Entrepreneurship theory and practice*, Vol. 17, pp. 65-81.

- _____, 1992 “The relationship between governance structure and corporate performance in entrepreneurship firms”, *Journal of Business Venturing*, Vol. 7, 1992, pp. 375-386.
- _____, 1993, “Board of directors leadership and structure: Control and performance implications”, *Entrepreneurship theory and practice*, Vol. 17, 1993, pp. 65-81.
- Daniri, Mas Ahmad, 2005, *Good Corporate Governance*, Ray Indonesia, Jakarta.
- _____, 2008, *Menyongsong Tahun 2008 Dengan Berbekal Good Governance*, Komite Nasional Kebijakan Governance, Jakarta
- Darmawati, D. et al., 2004, “Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan,” *Simposium Nasional Akuntansi VII*, Denpasar
- Dechow, Patricia M., R.G. Sloan hal A.P. Sweeney. (1996). *Causes And Consequences Of Earnings Manipulation: An Analysis Of Firms Subject To Enforcement Actions By The SEC*. *Contemporary Accounting Research* 13, 1-36
- Dechow, Patricia M. et al (1995), “Detecting Earnings Management”, *The Accounting Review*, April Vol. 70 No.2.
- Dhaliwal, D., Lee, K., Fargher, N., 1991, “The association between unexpected earnings and abnormal security returns in the presence of financial leverage”, *Contemporary Accounting Research*, Vol. 8, Issue 1, pp. 20-41.
- Dhaliwal, D. S., Salomon G. L., dan Smith, E. D. (1982). *The Effect of Owner Versus Management Control on the Choice of Accounting Methods*. *Journal of Accounting and Economics*, Vol.4. hal.41-53
- Durnev, A. dan E. H. Kim. 2003. *To steal or Not to Steal: Firm Attributes, Legal Environment, and Valuation*. Working Paper.
- Effendi, M. Arief, 2005, “Peranan Komite Audit dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan,” *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Volume 1, No. 1, Jakarta.
- Eisenberg, T., Sundgren, S., Wells, M., “Larger board size and decreasing firm value in small firms”, *Journal of Financial Economics*, Vol. 48, 1998, pp. 35-54.
- Eisenhardt, K., Schoonhovea, C., “Organizational growth: linking founding team, strategy, environment, and growth among U.S. semiconductor ventures, 1978-1988”, *Administrative Science Quarterly*, Vol. 35, 1990, pp. 504-529.

- Eisenhardt, Kathleen M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14, hal 57-74
- Faccio dan Ameghino, 1999, Managerial Ownership, board Structure and Firm Value: The UK Evidence, *JEL Classification*, <http://www.m.a.lasfer@city.ac.uk>
- Fama, E.F. and Jensen, M.C. 1983, Separation of Ownership and Control, *Journal of Law and Economics*, 26, pp. 301-325
- Faisal, 2004, Analisis Agency Cost, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance, Simposium Nasional VII, Ikatan Akuntansi Indonesia
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2003. Indonesian Company Law. Available on-line at www.fcgi.org.id
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gillan, S.L.; J.C. Hartzell; dan L.T. Starks. 2003. Industries, Investment Opportunities, and Corporate Governance Structures. Working Paper.
- Gompers, P., Ishii, L. and Metrick, A. 2003. "Corporate Governance and Equity Prices". *Quarterly Journal of Economics*. Vol. 118. pp: 107-155
- Ghufron, M. 2008, "69,3% Bank Tak patuhi GCG", www.jurnalnasional.com@2008, PT Media Nusa Pradana
- Grossman, S., Hart, O., 1986, "Corporate financial structure and managerial incentives", in *The Economics of Information and Uncertainty* (edited by J. J. McCall) Chicago: The University of Chicago, pp. 107-137.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics*. Fourth Edition. New York: McGraw-Hill Inc. Jakarta: Erlangga
- Haris, W. (2004). Pengaruh Earnings Management Terhadap Kinerja Di Sepuluh SEO. Tesis S2. Magister Sains Akuntansi UNDIP. Tidak dipublikasikan
- Hastuti, Theresia Dwi. 2005. "Hubungan antara Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan dengan Kinerja keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta)", Makalah SNA VIII, Solo.
- Herwidayatmo, 2000, "Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik Indonesia", *Usahawan* No 10 Th XXIX Oktober 2000

- Himmelberg, C. G. Hubbard, and D. Palia., 1999. Understanding the Determinants of Managerial Ownership and the Link Between Ownership and Performance, *Journal of Financial Economics*, Vol. 53, pp. 353-84.
- Hiro Tugiman. 2000. Pengaruh Peran Auditor Internal Serta Faktor-Faktor Pendukungnya Terhadap Peningkatan Pengendalian Internal Dan Kinerja Perusahaan. Disertasi Doktor pada Universitas Padjadjaran Bandung. .
- _____.-2004. Pengendalian Intern Organisasi yang Buruk Penyebab Utama Indonesia Merupakan Salah Satu Negara Terkorup di Dunia. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar. Universitas Widyatama. Bandung,
- Husnan, Suad., 2001, Corporate Governance dan Keputusan Pendanaan: Perbandingan Kinerja Perusahaan Dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Multinasional dan Bukan Multinasional *Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen, Ekonomi* Vol. 1 No.1. Februari 2001:1-12
- Jensen, M.C., and W. H. Meckling. 1976. "Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure". *Journal of Financial and Economics*, 3, 305-360.
- Jensen, M.C, 1993, The Modern Industrial Revolution, exit and the Failure of Internal Control System, *Journal Of Finance* 48 (Juli): 831-880
- Jiambalvo, J. 1996. "Discussion of Causes and Consequences of Earnings Manipulation." *Contemporary Accounting Research*. Vol. 13. Spring, p.37-47.
- Kakabadse, Nada Korac and Andrew K Kakabadse and Alexander Kouzmin. 2001, "Board Governance and Company Performence: Any Correlations ?". MCB University Press.
- Kang dan Asghar, 2000, "Board Leadership Structure and Firm Performance, Blackwell Publishing", <http://www.aslkang@ntu.edu.sg>
- Kieso, Donald E and Jerry J Weygandt. 1995. *Intermediate Accounting*. Fourth Edition. John Willey and Sons : New York.
- King, R, Levina, R. 1993, Finance and Growth: Schumpeper Might be Right, *Quarterly Journal of Economic* 108, 717 -738
- Klapper, L.F. and Love, I. 2002. "Corporate Governance, Investor Protection and Performance in Emerging Markets". *Journal of Corporate Finance*. Vol. 195.
- Klein, A., 2002, Audit Commite, Board of Director, Characteristics *Economics* (33), pp. 375-400

- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Jakarta.
- Kusumawati, Dwi Novi dan Bambang Riyanto LS. 2005. *Corporate Governance dan Kinerja: Analisis Compliance Reporting dan Struktur Dewan Terhadap Kinerja*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VIII Solo.
- Lastanti, S, Hexana, 2004, "Hubungan Struktur Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar," Prosiding Konvensi Nasional Akuntansi IV, Jakarta.
- Lipton, M., Lorsch, J., "A Modest Proposal for Improved Corporate Governance", *Business Lawyer*, Vol. 48, Issue 1, Nov92, pp. 59-78.
- Lobo, Gerald J. dan Jian Zhou (2001), "Disclosure Quality And Earnings Management", Social Science Research Network Electronic Paper Collection.
- Macey, J., and M. O'Hara., 2003, The Corporate Governance of Banks, Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review 9, no. 1 (April): 91-107.
- Maher, M., Andersson, T., 2000, "Corporate Governance: Effects on Firm Performance and Economic Growth", OECD working paper.
- Maher dan Anderson, 2001, "Corporate Governance : Effect on Performance and Economic Growth", Organization for Economic Co-operation and Development, <http://www.maria.maher@oecd.org>.
- Mayangsari, S. 2003. Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan. Makalah SNA VI, hlm. 1255-1273.
- McMullen, D.A., 1996. Audit Committee Performance: An Investigation of the Consequences Associated with Audit Committees. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 15, No. 1 p. 88-103.
- Merton, R.C. (1974). "On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates." *Journal of Finance* XXIX, no. 2 : 449-470.
- Midiastuty, Pratana P., dan Mas'ud Machfoedz. 2003. Analisis Hubungan Mekanisme Corporate Governance dan Indikasi Manajemen Laba. Artikel yang Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 6 Surabaya tanggal 16-17 Oktober 2003
- Mintzberg, H. 1973. The nature of managerial work. New York: Harper and Row.

- Mizruchi, M. S. 1983. Who Control Whom? An Examination of the Relation between Management and boards of Directors in Large American Corporation. *Academy of Management Review*, 8, 426-435.
- Mitton, Todd., 2002. A Cross-Firm Analysis of the Impact of Corporate Governance on the East Asian Financial Crisis. *Journal of Financial Economics*. Vol. 64. 215-241.
- Monks R., Minow, N., “Watching the Watchers: Corporate Governance for the 21st Century”, Cambridge, Blackwell, 1996.
- National Committee on Corporate Governance (NCCG). 2006. Indonesian Code for Good Corporate Governance
- Nuryanah, S. 2004. Analisis Hubungan *Board Governance* dengan Penciptaan Nilai Perusahaan: Studi Kasus Perusahaan-perusahaan Tercatat di BEJ. *Tesis Pascasarjana FEUI*.
- Peasnell, K.V., P.F. Pope, and S. Young, 2000, Board Monitoring and Earning Management, do Outside Director, Influence Abnormal Accruals, Working paper, Lancaster University
- Pfeffer, J., & Salancik, G. R. 1978. The external control of organizations. New York: Harper & Row
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PBI/2006 tentang *Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance bagi Bank Umum*.
- Porter, M., 1992, “Capital Disadvantage: America’s Failing Capital Investment System”, *Harvard Business Review*, Vol. 70, , pp. 65-82.
- Pradhono dan Yulius Jogi Crhristiawan. 2004. Pengaruh Economic Value Added, Residual Income, Earnings dan Arus Kas Operasi Terhadap Return yang Diterima Oleh Pemegang Saham (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol 6 No (November) : 140-166.
- Prowse, S. 1998, Corporate GovernNCE IN East Asia: A Frame work for Analysis, working paper, Federal Reserve Bank Of Dallas, Dallas Texas.
- Rahmawati. 2006. Model Penelitian Manajemen Laba pada Industri Perbankan Publik di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perbankan. Artikel yang Dipresentasikan pada Seminar Bulanan Jurusan Akuntansi FE-UNS tanggal 27 Mei 2006

- _____. 2006. Pengaruh Asimetri Informasi pada Hubungan antara Regulasi Perbankan dan Manajemen Laba serta Dampaknya pada Kinerja Saham. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Volume 6 No.1 Pebruari: 41-54
- _____ dan Zaki Baridwan. 2006. Pengaruh Asimetri Informasi, Regulasi Perbankan, dan Ukuran Perusahaan pada Manajemen Laba dengan Model Akrual Khusus Perbankan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Volume 6 No. 2 Agustus: 139-150
- _____, Yacop Suparno, dan Nurul Qomariyah. 2006. Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Artikel yang Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 6 Padang tanggal 23-26 Agustus 2006
- Rajgopal, S., M. Venkatachalam, dan J.Jiambalvo. 1999. Is Institutional Ownership Associated with Earning Management and the extent to which Stock Prices Reflect Future Earning?, Working Paper. Departement of Accounting University of Washington Seattle
- Richardson, Vernon J. (1998), "Information Asymmetry And Earnings Management : Some Evidence", Working Paper.
- Scott, W.R. 1997. *Financial Accounting Theory*, Prentice Hall. Inc.
- Shleifer, Andrei. dan Vishny, R.W. 1988. "Management ownership and market valuation: An empirical analysis". *Journal of Financial Economics* 20: 293-315
- Shleifer, Andrei. dan Vishny, R.W., 1997. "A Survey of Corporate Governance". *The Journal of Finance*. June, Vol. 52 (2), 737-783.
- Suaryana, Agung. 2005. Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Laba. Artikel yang Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 8 Solo tanggal 15 – 16 September 2005
- Setiawati, Lilis dan Ainun Na'im. 2001. Bank Health Evaluation by Bank Indonesia and Earnings Management in Banking Industry. *Gajah Mada International Journal of Business* Volume 3 No 2 May: 159-176
- Sugiarta, I Putu. 2004. Earnings Management and Information Content of Audit Committee Announcement. Artikel yang Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 7 Denpasar tanggal 2 -3 Desember 2004

- Sukamulja, Sukmawati, 2004, "Good Corporate Governance di Sektor Keuangan: Dampak GCG Terhadap Kinerja Perusahaan", Benefit, Volume 8, No. 1, Yogyakarta.
- Sulistiyanto.S, 2003. "Good Corporate Governance: Bisakah Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat?". Jurnal Ekonomi dan Bisnis-ekobis, (Online), Vol. 4, No. 1, (<http://artikel.us/sulistiyanto1.html>, diakses 1 Desember 2005).
- Supriyatno, 2006, Pengaruh Corporate Governance dan Bentuk Kepemilikan terhadap Kinerja Keuangan Bank di Indonesia, Disertasi, UGM, Yogyakarta
- Suwito,E., Herawati,A., 2005, Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba Yang Dilakukan Oleh perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta, Seminar Nasional Akuntansi, SNA VIII Solo, 15 – 16 September 2005
- Syahroza, Akhmad, 2003, Best practices Corporate Governance dalam Kontek Kondisi Lokal perbankan Indonesia, Usahawan No. 06 TH XXXII Juni 2003, 13-20
- Tim BEINEWS Menata Bank dengan Good Corporate Governance, BEI NEWS Edisi 19 Tahun V, Maret-April 2004)
- Veronica, Sylvia, dan Siddharta Utama. 2005. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management). Artikel yang Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 8 Solo tanggal 15 - 16 September 2005
- _____ dan Yanivi S Bachtiar. 2004. Good Corporate Governance Information Asymetry and Earnings Management. Artikel yang Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 7 Denpasar tanggal 2 -3 Desember 2004
- Xie, Biao, Wallace N Davidson III, and Peter J. Dadalt. 2003. Earnings Management and Corporate Governance: The Role of The Board and The Audit Committee. Journal of Corporate Finance Volume 9 Juni: 295-316
- Warfield, T. D., Wild, J. J., dan Wild, K. L., "Manajerial Ownership, Accounting Choice and Informativeness of Earnings", *Journal of Accounting & Economics* 20 (1995), hal. 61-91
- Watts. R.L. and J.L. Zimmerman. 1978. Towards A Positive Theory of The Determination of Accounting Standards, *The Accounting Review*. 53 (January). p. 112-134
- Wedari, Linda Kusumaning. 2004. Analisis Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Audit terhadap Aktivitas Manajemen Laba. Artikel yang

Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 7 Denpasar tanggal 2 -3 Desember 2004

Wilopo, 2004, *The Analysis of Relationship of Independent Board of Directors, Audit Committee, Corporate Performance, and Discretionary Accruals*. Ventura Volume 7 No. 1 April: 73-83

Wulandari, Ndaruningpuri, 2005, Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia, thesis, Program Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro, Semarang. (Tidak Dipublikasikan)

Yermack, D., 1996. Higher Market Valuation of Companies with Small Board of Directors. *Journal of Financial Economics* 40, 185-211.

Yu, Frank. 2006. Corporate Governance and Earnings Management. Working Paper

Young, M., "Accounting Irregularities and Financial Fraud: A Corporate Governance Guide", Harcourt, Inc., 2000.

Zahra, S., Pearce, J., 1989, "Boards of directors and corporate financial performance: A review and integrative model", *Journal of Management*, Vol. 15, pp. 291-334.

Zhou, Jian and Ken Y. Chen. 2004. Audit Committee, Board Characteristics and Earnings Management by Commercial Banks. Working Paper

Zuhroh, Diana. 1996. *Faktor-faktor yang Mendorong Perataan Laba Pada Perusahaan Publik Indonesia*. Tesis Program Pasca Sarjana Master of Science Universitas Gadjah Mada.

LAMPIRAN I

DAFTAR NAMA SAMPEL

No.	KODE	NAMA BANK
1	AGRO	Bank Agroniaga
2	INPC	Bank Artha Graha Internasional Tbk.
3	ANKB	Bank Artha Niaga Kencana Tbk.
4	BBIA	Bank Buana Indonesia Tbk.
5	BBKP	Bank Bukopin Tbk
6	BNBA	Bank Bumi Arta Tbk.
7	BABP	Bank Bumiputera Indonesia Tbk.
8	BBCA	Bank Central Asia Tbk.
9	BCIC	Bank Century Tbk.
10	BDMN	Bank Danamon Tbk.
11	BAEK	Bank Ekonomi Raharja
12	BEKS	Bank Executive Internasional Tbk.
13	SDRA	Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk.
14	BNII	Bank Internasional Indonesia Tbk.
15	BKSW	Bank Kesawan Tbk.
16	LPBN	Bank Lippo Tbk.
17	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.
18	MAYA	Bank Mayapada Tbk.
19	MEGA	Bank Mega Tbk.
20	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
21	BNGA	Bank Niaga Tbk.
22	NISP	Bank NISP Tbk.
23	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
24	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk
25	BNLI	Bank Permata Tbk.
26	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
27	BSWD	Bank Swadesi Tbk.
28	BVIC	Bank Victoria Internasional Tbk.

LAMPIRAN II

DATA PENELITIAN

No.	Y	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆
1	0,0566	0,97860	15	7	2	4	0,8837
2	0,0278	0,71650	4	8	1	2	0,8837
3	0,0144	0,99300	7	4	1	3	0,9294
4	0,0323	0,58040	46	8	2	3	0,9066
5	0,0596	0,66250	4	7	3	4	0,8652
6	0,0262	0,62400	12	7	5	5	0,8833
7	0,0079	0,80090	4	5	1	3	0,9387
8	0,0240	0,81530	4	4	2	3	0,8757
9	0,0273	0,57280	32	6	2	3	0,9334
10	0,0253	0,58000	12	7	2	3	0,9231
11	0,0234	0,54320	4	7	5	2	0,9184
12	0,0182	0,63200	4	4	1	3	0,9374
13	0,0563	0,71180	4	10	2	2	0,7962
14	0,0240	0,89270	24	10	3	4	0,9248
15	0,0224	0,88520	4	4	1	4	0,8750
16	0,0153	0,64190	4	3	1	2	0,8849
17	0,0159	0,35200	12	4	1	3	0,9076
18	0,0490	0,98150	26	7	3	5	0,8912
19	0,0038	0,97780	4	6	3	3	0,9507
20	0,0174	1,00000	4	4	2	3	0,8937
21	0,0338	0,87850	4	10	1	2	0,8644
22	0,0166	1,00000	4	6	3	3	0,9517
23	0,0443	0,51180	49	7	2	3	0,8945
24	0,0471	0,76410	7	6	3	6	0,8708
25	0,0069	0,89870	4	5	1	1	0,9209
26	0,0217	0,93090	8	10	4	5	0,9103
27	0,0128	0,81530	4	4	2	3	0,8947
28	0,0122	0,57280	32	6	1	3	0,9492
29	0,0202	0,64250	12	6	4	3	0,9045
30	0,0158	0,79460	4	8	3	3	0,8948
31	0,0152	0,63180	4	4	1	3	0,9424
32	0,0214	0,88520	4	3	2	4	0,8791
33	0,0175	0,17170	4	3	1	3	0,8905
34	0,0145	0,48070	12	3	1	3	0,9254
35	0,0229	0,71180	4	10	3	3	0,8695
36	0,0529	0,56970	34	8	4	5	0,8909

37	0,0059	0,96280	4	6	3	2	0,9501
38	0,0161	0,73690	4	4	2	3	0,8965
39	0,0377	0,87850	3	10	1	3	0,8061
40	0,0162	0,86430	11	7	2	3	0,9470
41	0,0259	0,90900	5	4	1	3	0,7950
42	0,0051	0,73050	12	3	3	3	0,9042
43	0,0364	0,51520	50	7	3	3	0,8978
44	0,0045	0,43600	12	4	1	3	0,9463
45	0,0286	0,69250	6	8	4	4	0,8820
46	0,0056	0,89570	6	5	1	3	0,9386
47	0,0214	0,94570	18	8	5	5	0,8995
48	0,0191	0,81530	4	5	2	3	0,8997
49	0,0096	0,52200	29	6	2	3	0,9375
50	0,0220	0,64060	12	6	4	4	0,8970
51	0,0154	0,79520	4	10	4	3	0,8986
52	0,0139	0,66730	4	4	1	3	0,9165
53	0,0294	0,74120	13	9	2	3	0,8244
54	0,0147	0,88690	12	4	2	4	0,8805
55	0,0144	0,59560	5	4	1	3	0,8938
56	0,0205	0,11360	12	3	1	3	0,9433
57	0,0057	0,98130	11	4	2	3	0,9176
58	0,0340	0,87880	4	10	1	3	0,8052
59	0,0172	0,81330	26	7	3	3	0,9428
60	0,0181	0,90900	5	5	2	3	0,7832
61	0,0071	0,73050	12	6	3	3	0,9154
62	0,0049	0,44680	12	5	3	3	0,9200
63	0,0400	0,72920	30	8	4	6	0,8751
64	0,0192	0,86160	4	4	2	4	0,9283
65	0,0089	0,68550	9	9	4	5	0,8999
66	0,0054	0,88970	4	5	1	3	0,9394
67	0,0306	0,94670	13	6	5	5	0,8992
68	0,0181	0,90730	4	7	2	3	0,7896
69	0,0237	0,55220	27	6	2	3	0,9158
70	0,0202	0,62910	13	6	3	4	0,9051
71	0,0143	0,79570	4	10	4	4	0,8837
72	0,0217	0,89010	10	8	4	3	0,8992
73	0,0330	0,11360	4	3	1	3	0,8771

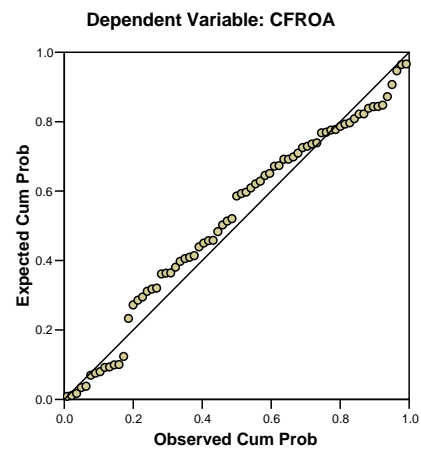
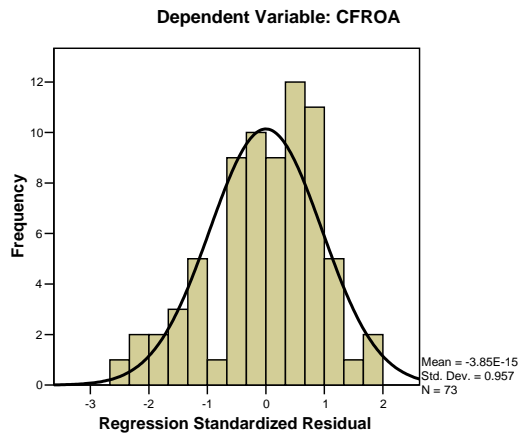
LAMPIRAN III

ASUMSI KLASIK

PENGUJIAN NORMALITAS

Histogram

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		73
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,45621095
Most Extreme Differences	Absolute	,096
	Positive	,074
	Negative	-,096
Kolmogorov-Smirnov Z		,822
Asymp. Sig. (2-tailed)		,508

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

PENGUJIAN MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,550	,168		3,282	,002		
	INST_OWN	,071	,085	,109	,842	,403	,842	1,188
	KOMIS	-,004	,003	-,165	-1,249	,216	,814	1,228
	DIR	-,011	,019	-,091	-,592	,556	,595	1,679
	K_INDEP	,030	,037	,132	,813	,419	,537	1,861
	K_AUD	-,012	,044	-,038	-,264	,793	,668	1,496
	LEV	,687	,799	,115	,859	,393	,789	1,267

a. Dependent Variable: ABRES

Coefficient Correlations^a

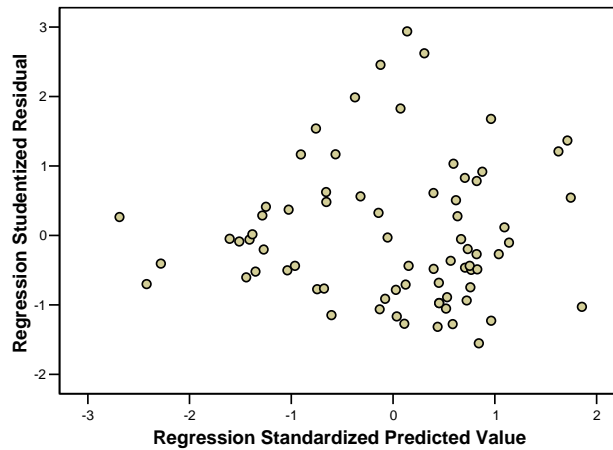
Model		LEV	K_INDEP	KOMIS	INST_OWN	K_AUD	DIR	
1	Correlations	LEV	1,000	-,253	-,267	,004	,180	,395
		K_INDEP	-,253	1,000	,044	-,067	-,521	-,454
		KOMIS	-,267	,044	1,000	,234	-,206	-,274
		INST_OWN	,004	-,067	,234	1,000	-,060	-,254
		K_AUD	,180	-,521	-,206	-,060	1,000	,177
		DIR	,395	-,454	-,274	-,254	,177	1,000
	Covariances	LEV	,638	-,007	-,001	,000	,006	,006
		K_INDEP	-,007	,001	,000	,000	-,001	,000
		KOMIS	-,001	,000	,000	,000	,000	,000
		INST_OWN	,000	,000	,000	,007	,000	,000
		K_AUD	,006	-,001	,000	,000	,002	,000
DIR	,006	,000	,000	,000	,000	,000		

a. Dependent Variable: ABRES

PENGUJIAN HETEROSKEDASTISITAS

Scatterplot

Dependent Variable: ABRES



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,550	,168		3,282	,002
	INST_OWN	,071	,085	,109	,842	,403
	KOMIS	-,004	,003	-,165	-1,249	,216
	DIR	-,011	,019	-,091	-,592	,556
	K_INDEP	,030	,037	,132	,813	,419
	K_AUD	-,012	,044	-,038	-,264	,793
	LEV	,687	,799	,115	,859	,393

a. Dependent Variable: ABRES

PENGUJIAN AUTOKORELASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,258 ^a	,066	-,018	,27558	1,771

a. Predictors: (Constant), LEV, K_INDEP, KOMIS, INST_OWN, K_AUD, DIR

b. Dependent Variable: ABRES

LAMPIRAN IV
OUTPUT REGRESI

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LEV, K_INDEP, KOMIS, INST_OWN, K_AUD, DIR ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: CFROA

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,710 ^a	,504	,459	,47650

a. Predictors: (Constant), LEV, K_INDEP, KOMIS, INST_OWN, K_AUD, DIR

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15,242	6	2,540	11,188	,000 ^a
	Residual	14,985	66	,227		
	Total	30,227	72			

a. Predictors: (Constant), LEV, K_INDEP, KOMIS, INST_OWN, K_AUD, DIR

b. Dependent Variable: CFROA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6,046	,290		-20,849	,000
	INST_OWN	-,306	,146	-,197	-2,090	,041
	KOMIS	,014	,006	,240	2,495	,015
	DIR	,078	,034	,262	2,336	,023
	K_INDEP	-,049	,063	-,091	-,773	,443
	K_AUD	,200	,075	,281	2,650	,010
	LEV	-6,776	1,382	-,478	-4,905	,000

a. Dependent Variable: CFROA